

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH MELALUI DIGITALISASI
INKLUSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
FISIK KOTA MAKASSAR**



Oleh:

AYUWARNI SEPTANIA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121018

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASI MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH MELALUI DIGITALISASI
INKLUSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
FISIK KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

AYUWARNI SEPTANIA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121018

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

Strategi Perencanaan Melalui Agenda Tahun
Sesuai Bagi Pemrosesan Disabilitas First Kom
Mikassar

Nama Mahasiswa :

Agneswati Septalia

Nomor Induk Mahasiswa :

105011121018

Program studi :

Ilmu Administrasi Negara

Mengesahkan

Pembimbing I

Pembimbing II


Nurbiah Tahin, S.Sos., M.A.P


Iwadi Amrullah, S.Sos., M.A.P

Diklas

Mengesahkan

Ketua Program Studi


Dr. A. H. Fikri Prianto, S.IP., M.Si
NIDN: 991707


Dr. Nur Widihi, S.Sos., M.Si
NIDN: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM



Telah diterima oleh Tim Pengajar Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0432/SP-S.4/II/VII/2023 sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Komunikasi yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 24 Agustus 2023.

Makassar,


Dr. Andi Nur Prisma, S.P., M.H.
NPM. 002197


Nurul Huda, S.Sos., M.Pd.
NPM. 0007403

Tan Pagar:

1. Nurul Huda, S.Sos., M.Pd.

2. Nurul Huda, S.Sos., M.Pd.

3. Dr. Nur Walid, S.Sos., M.H.





HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ayuwarni Septania
Nomor Induk Mahasiswa : 105611121018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

Ayuwarni Septania

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **"Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar"**. Penelitian ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini terdiri dari 3 bab yang tersusun secara sistematis yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Penutup. Penelitian Dalam penyusunan Skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap sebagai Pembimbing I saya dan bapak Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.Ap sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M. Ap selaku Sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak/ibu Dosen, serta seluruh staf di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga secara istimewa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya yang telah merawat, mendidik, memotivasi dan mendoakan tanpa henti.
2. Saudara dan sahabat saya atas bantuan, dukungan, dan doa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi Penelitian ini. Dan akhir kata penulis berharap semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk semua mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2 Agustus 2025

Penulis,

Ayuwami Septania

ABSTRAK

Ayuwarni Septania, Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP, Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP. Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori (Poerwati, dkk, 2024) yang dimana menggunakan indikator, (1) Akses Motivasi, (2) Akses Material, (3) Akses Keterampilan, (4) Akses Penggunaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa motivasi belajar penyandang disabilitas fisik tumbuh dari sinergi pendidikan, dukungan keluarga, serta pelatihan literasi digital pemerintah. Teknologi memberikan keterampilan dan kepercayaan diri, keluarga memberikan dukungan emosional, sementara pemerintah membuka ruang akses inklusif yang mendorong kemandirian. Meskipun demikian, keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta keterampilan digital dasar masih menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga berperan meski terbatas, sehingga diperlukan intervensi nyata dari pemerintah dan sekolah melalui penyediaan perangkat ramah disabilitas serta pelatihan literasi digital yang inklusif. Dengan adanya kolaborasi antara motivasi individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, penyandang disabilitas fisik berpeluang memperoleh akses pendidikan digital yang lebih setara, merata, dan berkeadilan.

Kata kunci : Strategi, Pemerintah, Digital, Inklusif, Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Teori dan Konsep	16
C. Kerangka Pikir	35
D. Fokus Penelitian	36
E. Deskripsi Fokus Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data	42
D. Informan	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Analisis Data	45

G.	Teknik Pengabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B.	Hasil Penelitian	58
C.	Pembahasan	70
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses informasi. Namun, kelompok ini masih sering menghadapi hambatan baik dari segi infrastruktur, sosial, maupun aksesibilitas teknologi. Di Kota Makassar, penyandang disabilitas fisik masih banyak mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan publik secara langsung karena kondisi mobilitas, minimnya sarana prasarana yang ramah difabel, serta masih adanya stigma sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif. Melalui digitalisasi inklusif sosial, pemerintah dapat memperluas jangkauan layanan berbasis aplikasi atau website sehingga lebih mudah diakses tanpa harus datang langsung ke kantor. Inovasi ini sangat penting untuk penyandang disabilitas fisik yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan adanya fitur aksesibilitas, misalnya teks suara, subtitle, bahasa isyarat digital, maupun desain ramah difabel, maka digitalisasi dapat benar-benar menghadirkan keadilan layanan.

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 Pasal 1, penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap individu yang memiliki kelainan mental dan/atau fisik yang dapat

menjadi hambatan maupun rintangan dalam melakukan aktivitas secara wajar. Kategori tersebut mencakup penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta gabungan keduanya. Sementara itu, International Classification of Functioning, Health and Disabilities (ICF) yang dikutip oleh Mutmainnah (2023) mendefinisikan disabilitas sebagai konsep yang terdiri atas dua aspek utama, yaitu: (1) struktur dan fungsi tubuh individu, serta (2) keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun dalam memperoleh akses dan partisipasi.

Pandangan masyarakat yang terbentuk dari kondisi tersebut sering kali menilai bahwa keterbatasan membuat penyandang disabilitas sulit berinovasi dan berkreasi seperti orang lain, sehingga kesempatan kerja bagi mereka menjadi lebih sempit. Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar, maka keberadaan dan hak-hak mereka perlu mendapat perhatian yang serius.

Menurut data Kementerian Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2024 Estimasi total penyandang disabilitas berkisar antara 4,3 juta (tingkat sedang-berat) hingga 22,97 juta (seluruh kategori disabilitas). Perlu ditambahkan bahwa data resmi administrasi masih jauh di bawah angka sebenarnya (<800 ribu), menunjukkan kebutuhan validasi data menyeluruh. Menurut data Dinas Sosial Kota Makassar, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.176 jiwa penyandang disabilitas. Sebagian besar dari mereka masih bergantung pada pekerjaan yang kurang layak, seperti pengemis eks-kusta atau penyandang tuna netra yang

mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima. Kondisi tersebut tidak hanya menambah beban permasalahan sosial, tetapi juga mencerminkan persoalan serius yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu sendiri.

Kota Makassar termasuk dalam jajaran kota besar yang ada di Indonesia yang telah mendorong transformasi digital melalui program *Smart City*. Namun, agar digitalisasi tidak menimbulkan kesenjangan baru, pemerintah perlu memastikan bahwa layanan digital benar-benar inklusif, yaitu Bisa dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Upaya tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas yang menekankan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi penuh, dan inklusi sosial.

Namun, tantangan dalam implementasi strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik masih ada, termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam merancang layanan yang aksesibel, serta hambatan fisik dan teknologi yang menghalangi aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan inklusi sosial yang Kenyataannya bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sering dihadapkan pada beragam tantangan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas umum, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Di Kota Makassar, isu ini menjadi perhatian penting mengingat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan.

Data dari Bappelitbangda Sulawesi Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa Makassar memiliki 30.373 penyandang disabilitas, yang merupakan 12,286% dari total populasi kota. (Sulsel, 2024)

Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pada November 2023, Makassar menerima Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas atas upayanya dalam menghormati serta menjaga hak-hak disabilitas. Penghargaan ini mencerminkan visi kota untuk menjadi "Sombere and Smart City" yang inklusif bagi semua warganya. (Makassar, 2023) Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akses transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Makassar masih jauh dari optimal. Sebagai contoh, layanan Bus Trans Mamminasata beserta halte yang tersedia belum sepenuhnya ramah disabilitas karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar. (Aprizal & Samin, 2021)

Di sektor ketenagakerjaan, terdapat 1.016 pekerja disabilitas di Makassar per tahun 2022. Pemerintah kota melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Ketenagakerjaan berupaya memastikan hak-hak ketenagakerjaan mereka terpenuhi, termasuk Memberikan dukungan melalui program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi serta akses terhadap lapangan pekerjaan. (Kota et al., 2023) Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, program "MAJU BERSAMA" diluncurkan pada Oktober 2024 oleh Setara Berdaya Group bekerja sama dengan Pelindo Regional 4 Makassar. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM penyandang

disabilitas di wilayah Mamminasata, dengan fokus pada digitalisasi usaha, pengaturan keuangan, dan strategi pemasaran (Sulsel, 2024)

Di Makassar, inisiatif untuk mengembangkan aplikasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik dapat memperkuat upaya pemerintah dan Peran masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif dan aksesibel sangatlah penting. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas disabilitas diperlukan agar solusi teknologi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya inklusi digital bagi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pelatihan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi, serta peningkatan kesadaran di kalangan pengembang aplikasi dan masyarakat umum tentang pentingnya desain yang inklusif.

Dengan strategi yang tepat, pengembangan program aplikasi inklusif sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di Makassar. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Individu dengan disabilitas fisik kerap berhadapan dengan beragam hambatan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas umum, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Di Kota Makassar, isu ini menjadi perhatian penting mengingat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 3.634 penyandang disabilitas di Makassar, dengan 2.110 di antaranya mengalami

disabilitas fisik (*DATA DISABILITAS BERDASAR RAGAM DISABILITAS*, 2024). Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas. Berbagai langkah telah ditempuh untuk menjamin setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses setara terhadap layanan publik. (Layanan & Disabilitas, 2022)

Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada. Penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan Akses bagi penyandang disabilitas di Makassar masih belum maksimal. Contohnya, fasilitas umum dan layanan publik belum sepenuhnya inklusif karena keterbatasan sarana serta prasarana yang sesuai standar. (Hendrawati, 2017) Di sektor ketenagakerjaan, data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 1.352 penyandang disabilitas di Makassar, mayoritas bekerja di sektor informal. (Adolph, 2016) Pemerintah kota melalui berbagai program berupaya memastikan hak-hak ketenagakerjaan mereka terpenuhi. Termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kompetensi serta peluang kerja.

Perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Pengembangan aplikasi yang dirancang khusus dapat membantu mereka mengakses informasi, layanan, dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Aplikasi semacam itu dapat mencakup fitur-fitur seperti navigasi aksesibilitas, platform pelatihan online, dan jaringan sosial yang mendukung. Di Makassar, inisiatif untuk

mengembangkan aplikasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik dapat memperkuat upaya pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah dan aksesibel, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas. Kerja sama ini menjadi kunci untuk memastikan setiap solusi yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas. teknologi yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. (Layanan & Disabilitas, 2022)

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar juga mengembangkan program pendidikan berbasis digital dalam kerangka digitalisasi inklusi sosial bertujuan menyediakan akses pembelajaran yang setara dan ramah bagi penyandang disabilitas. Program ini berfokus pada peningkatan literasi digital dasar, penguatan keterampilan akademik maupun vokasional, serta dukungan kemandirian melalui pemanfaatan teknologi. Upaya yang dilakukan meliputi pendidikan non-formal berbasis digital dengan modul kejar paket A-C yang dilengkapi media aksesibel seperti video bersubtitle, audio book, dan braille digital. Untuk mendukungnya, dikembangkan pula platform daring "Makassar Belajar Inklusif" yang dapat diakses dengan berbagai perangkat melalui fitur aksesibilitas.

Selain pendidikan akademik, Dinas Sosial juga memberikan pelatihan vokasional digital, seperti mengetik dengan screen reader, pembuatan konten audio atau podcast, dan desain grafis sederhana untuk membuka peluang kerja maupun wirausaha. Layanan diperluas melalui pusat pembelajaran inklusif

digital di tingkat kota dan kelurahan, serta unit belajar keliling bagi wilayah yang terbatas akses. Program ini turut melibatkan keluarga dan pendamping dengan pelatihan literasi digital dan parenting inklusif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan setara dalam pendidikan digital sekaligus lebih siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan dunia kerja.

Dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis digital bagi penyandang disabilitas, pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Makassar menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur, di mana tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil serta ketersediaan perangkat teknologi bantu yang masih terbatas dan mahal. Di samping itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi hambatan karena belum sepenuhnya tenaga pendidik maupun aparatur memahami metode pembelajaran inklusif dan pemanfaatan teknologi aksesibel. Hambatan lain muncul dari koordinasi lintas sektor, mengingat program ini membutuhkan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Diskominfo, Disnaker, serta organisasi penyandang disabilitas, yang sering kali memerlukan waktu panjang dalam penyelarasan kebijakan. Dari sisi pendanaan, anggaran yang tersedia di APBD masih terbatas sehingga menyulitkan penyediaan alat bantu maupun pengembangan platform pembelajaran digital. Tidak kalah penting, masih adanya stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas juga menjadi faktor penghambat implementasi program.

Sementara itu, penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat juga menghadapi tantangan tersendiri. Akses terhadap teknologi masih menjadi

persoalan utama, karena tidak semua penyandang disabilitas memiliki gawai atau komputer pribadi, bahkan biaya internet. Hal ini juga sering menjadi hambatan bagi individu yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dari segi keterampilan, sebagian peserta masih minim pengetahuan dasar mengenai penggunaan aplikasi digital sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Hambatan fisik dan sensorik juga turut memengaruhi, misalnya penyandang tunanetra yang membutuhkan screen reader atau penyandang tuli yang membutuhkan layanan penerjemah bahasa isyarat, yang jika tidak tersedia akan menghambat proses belajar. Selain itu, banyak penyandang disabilitas masih bergantung pada peran pendamping atau keluarga, sehingga apabila pendamping tidak terlatih, proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Faktor psikologis seperti rasa minder, rendah diri, serta stigma dari lingkungan sekitar juga membuat sebagian penyandang disabilitas kurang percaya diri untuk aktif berpartisipasi dalam pendidikan berbasis digital.

Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan di Makassar perlu untuk bekerja sama dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi teknologi yang mendukung inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, sehingga tercipta kota yang benar-benar ramah bagi semua warganya.

Berdasarkan penjelasan melalui latar belakang maka uraian permasalahan diatas penulis tertarik meneliti tentang “Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang serta masalah yang telah dipaparkan, dapat disusun rumusan masalah, yakni bagaimana Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah yang tepat dalam digitalisasi inklusif sosial dan dapat meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih menyeluruh tentang Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa di Kota Makassar, terutama dalam memahami konsep dan teori yang relevan serta memberikan informasi dan data terkait penelitian tentang Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar Manfaat Praktis.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran mengenai strategi pemerintah dalam mendorong digitalisasi inklusif sosial bagi

penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, serta memberi manfaat nyata bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding sekaligus sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya, serta membantu memposisikan penelitian yang sedang dilakukan dan menegaskan orisinalitasnya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Edi Chandra Juliansyah Lubis, Merti Subardhini dan Dorang Luhpuri (2020)	Aksesibilitas Penyang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.	Metode penelitian tindakan partisipatif	Penelitian ini bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan pada organisasi maupun masyarakat. Berdasarkan hasil asesmen, tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap dunia kerja di Kelurahan Cipaisan masih tergolong rendah. Keberadaan sejumlah perusahaan dan lembaga penyedia lapangan pekerjaan di wilayah tersebut belum sepenuhnya menjamin penyandang disabilitas fisik dapat memperoleh kesempatan kerja yang layak.
2	Riski Trisnawati 2019	Pemberdayaan Penyang Disabilitas Fisik Melalui Balai Rehabilitas Sosial Penyang Disabilitas Fisik Wirajaya Di Makassar : suatu Upaya Untuk Membangun Kreativitas.	Metode Penelitian Kualitatif	Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya terbukti mampu meningkatkan kreativitas pada diri penyandang disabilitas fisik. Penerima manfaat yang mengikuti pembinaan selama enam bulan menunjukkan perkembangan positif, antara lain meningkatnya rasa percaya diri, kreativitas, akhlak, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kreativitas yang mereka miliki menjadi bekal penting untuk lebih berdaya guna di masa mendatang. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam

				menghasilkan berbagai karya, seperti jam dinding, tas berbahan kain, lampion dari gelas plastik bekas, tempat tisu berbahan kayu, dan beragam produk lainnya. Proses tersebut juga menumbuhkan kemandirian bagi penyandang disabilitas fisik binaan BRSPDF Wirajaya.
3	Bernadete Filyana Putri, Dewi Noor Azijah dan Gun Gun Gumila 2024	Akseibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Di Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi	Metode Penelitian Kualitatif	Studi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas, antara lain ketersediaan ramp, lift, pegangan tangan, serta toilet aksesibel. Pemanfaatan teknologi juga dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas aksesibilitas, misalnya melalui aplikasi peta rute yang inklusif maupun perangkat bantu berbasis teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas sangat diperlukan guna mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, yakni peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi, serta keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, sebagai upaya penting untuk mencapai aksesibilitas yang lebih optimal.
4	Nurul Aldha Mauliddina Siregar dan Arie Purbantara 2020	Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo berhasil mengubah stigma diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menjadi tindakan yang lebih bermakna. Upaya tersebut dilakukan sebagai strategi pemberdayaan, dengan menempatkan penyandang disabilitas bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan. Masyarakat penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk berkontribusi

				dalam memajukan desa melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program budaya dan kesenian. Peran ini mendorong tumbuhnya kemandirian penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan penerimaan mereka di tengah masyarakat desa.
--	--	--	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Chandra Juliansyah Lubis, Meiti Subardhini, dan Dorang Luhpuri (2020) membahas mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap lapangan pekerjaan di Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan metode penelitian tindakan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak perusahaan atau lembaga penyedia pekerjaan di wilayah tersebut, penyandang disabilitas fisik masih kesulitan memperoleh pekerjaan karena aksesibilitas yang belum memadai. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan pada organisasi dan masyarakat agar lingkungan kerja lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, penelitian Riski Trisnawati (2019) menggunakan metode kualitatif untuk meneliti Upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik dilaksanakan melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan selama enam bulan mampu meningkatkan kepercayaan diri, kreativitas, budi pekerti, dan kemampuan adaptasi penyandang disabilitas dengan lingkungannya. Para penerima manfaat bahkan telah menghasilkan berbagai karya seperti jam dinding, tas kain,

lampion, dan tempat tisu, yang menandakan bertumbuhnya kemandirian serta kemampuan mereka untuk berdaya guna di masyarakat.

Menurut penelitian Bernadete Filyana Putri, Dewi Noor Azijah, dan Gun Gun Gumila (2024), yang meneliti aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi dengan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa fasilitas ramah disabilitas seperti ramp, lift, pegangan tangan, dan toilet aksesibel sudah mulai tersedia. Teknologi pun dipandang berpotensi memperluas aksesibilitas melalui inovasi, termasuk aplikasi peta rute aksesibel dan perangkat bantu berbasis teknologi. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas, yang diimbangi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif.

Terakhir, penelitian Nurul Aldha Mauliddina Siregar dan Arie Purbantara (2020) menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji Strategi pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Panggunharjo membuktikan bahwa pemerintah desa berhasil mengubah stigma diskriminatif menjadi langkah konkret pemberdayaan. Penyandang disabilitas diberikan peran sebagai subjek pembangunan melalui keterlibatan dalam program budaya dan kesenian. Melalui partisipasi tersebut, mereka terdorong untuk lebih mandiri, dapat memenuhi kebutuhan hidup, serta memperoleh penerimaan yang lebih luas dari masyarakat desa.

B. Konsep Teori

1. Konsep Strategi

Secara umum, strategi merupakan serangkaian rencana atau langkah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, pendidikan, dan pemberdayaan sosial, strategi berfungsi sebagai panduan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif, menghadapi tantangan, dan memastikan pencapaian sasaran yang diinginkan. Strategi inklusif, misalnya, berorientasi pada penghapusan hambatan partisipasi dan menciptakan keterlibatan yang setara bagi semua pihak, khususnya kelompok yang selama ini terpinggirkan (Judijanto, 2025). Dalam dunia pendidikan, strategi inklusif menjadi salah satu pendekatan kunci untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan memastikan semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki kesempatan belajar yang setara. Strategi ini mencakup adaptasi kurikulum, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. (Rona Handayani dkk, 2023) menekankan bahwa strategi pembelajaran inklusif harus mengedepankan kolaborasi antar siswa, modifikasi perangkat ajar, dan dukungan tambahan agar perkembangan akademik dan sosial anak inklusif dapat terfasilitasi dengan baik.

Selain dalam konteks sekolah dasar hingga menengah, strategi inklusif juga relevan di perguruan tinggi. Penelitian Muhibbin (2021) menemukan bahwa pengembangan strategi inklusi di kampus menghadapi beberapa tantangan,

seperti keterbatasan infrastruktur ramah difabel, paradigma diskriminatif, dan kurangnya kompetensi dosen dalam menangani mahasiswa disabilitas. Untuk mengatasinya, strategi yang direkomendasikan mencakup penguatan regulasi, penyediaan fasilitas aksesibilitas, pendampingan mahasiswa difabel, dan pengembangan model pembelajaran adaptif (Muhibbin, 2021). Strategi semacam ini mendorong kampus menjadi lingkungan belajar yang adil dan kolaboratif bagi semua mahasiswa.

Di tingkat praktik pembelajaran, strategi tidak hanya terkait dengan kebijakan makro, tetapi juga menyentuh metode dan teknik pembelajaran di kelas. Mulyani & Abidinsyah (2021) meneliti strategi guru di SDN Antar Baru 1 Marabahan, yang menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk ABK. Guru menggunakan strategi pengulangan materi, pendekatan individual, dan pembinaan motivasi untuk memastikan siswa ABK dapat mengikuti pembelajaran secara efektif, meskipun terdapat keterbatasan fasilitas dan ketiadaan guru pendamping khusus (Mulyani & Abidinsyah, 2021).

Dalam konteks organisasi dan dunia kerja, strategi inklusif juga dapat diterapkan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ariyanto dkk (2024) menekankan bahwa strategi pelatihan yang bersifat inklusif, seperti lokakarya kesadaran budaya, mentoring lintas budaya, dan komunikasi efektif antar karyawan beragam, mampu meningkatkan keterlibatan dan kinerja karyawan di tengah keberagaman. Dukungan manajemen dan fleksibilitas dalam desain pelatihan menjadi faktor kunci keberhasilan strategi inklusif ini.

Dari keseluruhan kajian, terlihat bahwa konsep strategi bersifat adaptif dan kontekstual. Dalam pendidikan, strategi inklusif membantu menutup kesenjangan akses dan partisipasi bagi peserta didik yang berbeda latar belakang. Di dunia kerja, strategi inklusif memperkuat budaya kolaboratif dan mendorong produktivitas dalam lingkungan multikultural. Dengan perencanaan yang tepat, implementasi yang konsisten, dan dukungan sumber daya yang memadai, strategi inklusif mampu menjadi instrumen utama untuk menciptakan sistem yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Konsep Inklusi Sosial

Secara etimologis, istilah inklusi berasal dari bahasa Latin *inclusio* yang berarti "penyertaan" atau "memasukkan" sesuatu ke dalam suatu kelompok atau struktur sosial. Kata ini dibentuk dari gabungan *in-* (di dalam) dan *cludere* (menutup) sehingga secara harfiah bermakna tindakan memasukkan individu atau kelompok agar tidak terkucilkan dari sistem sosial yang ada (Oxford, 2024). Dalam perkembangannya, istilah inklusi digunakan untuk merujuk pada praktik dan kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang selama ini rentan dan terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin, dapat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, inklusi sosial merupakan antitesis dari eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok tertentu tersingkir dari akses sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk berperan dalam kehidupan masyarakat (Gutama & Widiyahseno, 2020). Inklusi sosial hadir untuk mengatasi kondisi ini dengan memberikan kekuatan dan kesempatan agar individu yang sebelumnya terpinggirkan dapat berpartisipasi aktif, memperoleh haknya, dan diakui sebagai bagian dari komunitas. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas tidak cukup hanya "diberi akses", tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program sosial yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam praktiknya, inklusi sosial mencakup tiga aspek utama:

- a. Kesetaraan akses terhadap layanan publik dan sumber daya, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang kerja.
- b. Partisipasi penuh dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik tanpa diskriminasi.
- c. Penerimaan dan pengakuan atas keberagaman individu dalam komunitas, sehingga keberadaan kelompok rentan tidak hanya ditoleransi tetapi juga diapresiasi sebagai bagian dari kekuatan sosial.

Hasil penelitian Muthia & Fauziah (2024) menunjukkan bahwa inklusi sosial memerlukan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, program layanan yang mendukung keterlibatan masyarakat, dan

kolaborasi dengan komunitas difabel. Studi mereka di Perpustakaan Kota Bogor menegaskan pentingnya enam elemen utama inklusi sosial: penyediaan koleksi yang aksesibel (misalnya buku braille), penghilangan hambatan fisik, kemitraan dengan organisasi disabilitas, pengembangan program rutin yang melibatkan difabel, pelatihan staf, dan promosi layanan agar kelompok rentan mengetahui hak dan akses mereka.

Selain itu, transformasi layanan publik berbasis inklusi sosial telah terbukti menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat. Kurniasih & Saefullah (2021) mencontohkan perpustakaan daerah Karanganyar yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat peminjaman buku, tetapi juga sebagai ruang komunitas inklusif. Perpustakaan ini menyediakan layanan kreatif seperti kelas fotografi, jurnalistik, pelatihan berbasis TIK, dan ruang makerspace yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa inklusi sosial dapat diwujudkan melalui pemberdayaan berbasis komunitas yang memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar warga.

Penerapan inklusi sosial di Indonesia juga relevan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya prinsip "Leave No One Behind". Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan harus menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok

miskin, marginal, dan disabilitas (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 menjadi dasar hukum untuk memastikan setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum, hak asasi, dan akses yang setara dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Murwaningsih & Wedjajati (2021) menemukan bahwa inklusi sosial yang diterapkan di tingkat komunitas, seperti desa inklusif di Kulon Progo, mampu menciptakan lingkungan sosial yang ramah difabel. Desa ini membentuk Forum Disabilitas untuk memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menyediakan fasilitas publik ramah difabel dan program pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan lokal. Praktik ini menegaskan bahwa inklusi sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus berbentuk tindakan nyata yang mengubah struktur sosial agar lebih adil dan partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial adalah proses strategis dan berkelanjutan yang menggabungkan kebijakan, layanan publik, dan pemberdayaan komunitas untuk menghapuskan pengucilan sosial. Inklusi sosial menuntut perubahan paradigma, dari sekadar menyediakan akses menjadi menciptakan partisipasi bermakna bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas,

penerapan inklusi sosial tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga memperkaya kehidupan masyarakat secara keseluruhan melalui keberagaman perspektif, pengalaman, dan kontribusi.

3. Pengertian Disabilitas Fisik

Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kondisi sakit atau cedera yang mengurangi atau membatasi kemampuan fisik maupun mental seseorang, serta keadaan yang membuat individu tidak mampu melakukan aktivitas dengan cara yang lazim. Disabilitas dipandang sebagai suatu kekurangan yang menyebabkan berkurangnya nilai maupun mutu seseorang. Sementara itu, penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami gangguan pada tubuhnya, baik berupa kerusakan pada anggota badan, cacat akibat kecelakaan atau peperangan, kelainan bentuk, maupun penurunan fungsi tubuh yang terjadi sejak lahir atau akibat penyakit yang dialami. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan nyata dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Menurut definisi World Health Organization (WHO), disabilitas merupakan keterbatasan atau berkurangnya fungsi organ yang berdampak pada kemampuan fisik maupun mental seseorang dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini menyebabkan individu tidak dapat menjalankan aktivitas sesuai aturan atau standar normal, dan umumnya

dipahami dalam tingkat individu. (Afin Murtie, Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta : Maxima, 2016), h. 88.)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa disabilitas adalah kondisi seseorang yang memiliki perbedaan kemampuan dibandingkan dengan individu pada umumnya, sehingga menimbulkan keterbatasan fisik maupun mental. Selain itu, adanya hambatan sosial juga turut memengaruhi sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas.

4. Hak-hak penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup sejahtera, memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan publik, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus agar dapat memiliki kesempatan dan manfaat yang setara dalam mewujudkan persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. (Ridhwan, 2013).

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin dikuatkan dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengadopsi prinsip-prinsip Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konvensi internasional ini

menekankan delapan prinsip utama, di antaranya penghormatan terhadap martabat yang melekat (*inherent dignity*), non-diskriminasi, partisipasi penuh dalam masyarakat, kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas (Violetta & Susetyo, 2023).

Dengan prinsip ini, penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Salah satu hak mendasar yang menjadi sorotan adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa proporsi pekerja disabilitas di Indonesia masih sangat rendah, dan sebagian besar bekerja di sektor informal atau wirausaha mandiri. Diskriminasi dalam ketenagakerjaan dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi penghambat utama pemenuhan hak ini. Padahal, UU No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 mewajibkan pemerintah dan sektor swasta memberikan kuota khusus bagi pekerja disabilitas, yakni minimal 2% di instansi pemerintah dan 1% di perusahaan swasta (Sihombing & Sihombing, 2024).

Selain itu, hak partisipasi dalam proses politik dan pembentukan kebijakan juga merupakan aspek penting dari hak penyandang disabilitas. Penelitian Violetta & Susetyo (2023) menyoroti bahwa

dalam pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim. Hal ini mencerminkan belum terwujudnya meaningful participation, padahal Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 mengamanatkan akses dan keterlibatan publik yang setara. Minimnya akses dokumen dan fasilitas pendukung seperti closed caption dan juru bahasa isyarat, menjadi bukti nyata bahwa hak atas informasi bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Hak-hak lain yang tidak kalah penting adalah hak memperoleh perlindungan hukum dan bebas dari diskriminasi, hak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Penelitian Farrisqi & Pribadi (2022) menekankan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi di lapangan masih lemah, terlihat dari rendahnya tingkat keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja dan terbatasnya fasilitas publik yang ramah disabilitas. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memberdayakan mereka melalui pengakuan dan kesempatan kerja yang setara.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas memerlukan sinergi antara regulasi, implementasi, dan perubahan paradigma sosial. Negara wajib menjamin perlindungan hukum dan

kesetaraan kesempatan, sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan bebas stigma. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat sendi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

5. Faktor-faktor penyebab disabilitas fisik

Disabilitas fisik, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, dapat disebabkan oleh faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Menurut Agustina (2021), penyebab disabilitas fisik dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar: pra-lahir, seperti gangguan genetik dan kekurangan nutrisi selama kehamilan; saat lahir, yang melibatkan komplikasi dalam proses persalinan; dan pasca-lahir, seperti kecelakaan, infeksi, atau trauma. Dalam konteks disabilitas digital, keterbatasan fisik yang berasal dari tahapan ini menjadi penghalang utama untuk mengakses teknologi secara merata, terutama ketika tidak ada intervensi medis atau rehabilitasi yang memadai.

Sementara itu, dari sisi sosial dan lingkungan, Sumilah (2020) menyoroti bahwa kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan khusus, serta minimnya kesadaran orang tua terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus merupakan faktor-faktor yang turut memperburuk kondisi disabilitas fisik menjadi disabilitas digital. Anak-anak dengan disabilitas yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan fasilitas teknologi adaptif seperti

perangkat lunak pendukung atau alat bantu komunikasi, sehingga mereka terisolasi dari ekosistem digital sejak dini.

Dalam studi literatur yang dilakukan oleh I Made Narendra Nanta Wisesa dan Tience Debora Valentina (2024), disimpulkan bahwa resiliensi penyandang disabilitas fisik sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi regulasi emosi, self-efficacy, kemampuan coping, dan fleksibilitas kognitif, sedangkan faktor eksternal terdiri dari dukungan orang tua dan teman sebaya. Kurangnya dukungan ini membuat penyandang disabilitas fisik lebih rentan terhadap penarikan diri, depresi, dan hilangnya motivasi untuk beradaptasi dengan lingkungan digital. Ketika resiliensi rendah, akses dan penggunaan teknologi digital juga menjadi sangat terbatas.

Lebih jauh, Wisesa juga mengutip beberapa penelitian lain (seperti dari Miller et al., Iga & Kristinawati, dan Larasati & Savira) yang menunjukkan bahwa trauma akibat kecelakaan, diskriminasi sosial, dan kurangnya rasa percaya diri adalah hambatan psikologis yang signifikan dalam membangun resiliensi. Dalam konteks digital, hambatan ini berkontribusi pada terjadinya disabilitas fisik digital, yaitu kondisi di mana individu tidak hanya terbatas secara fisik tetapi juga tidak mampu mengakses dunia digital secara aktif karena hambatan mental, sosial, dan teknologi.

6. Aksesibilitas dan Teknologi Digital

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan. Di negara berkembang, teknologi digital menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi berbagai hambatan seperti kurangnya tenaga pengajar, keterbatasan sarana pendidikan, dan jarak geografis yang menyulitkan pemerataan pendidikan. Caroline dan Aslan (2025) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas, bahkan bagi siswa di daerah terpencil. Mereka menekankan bahwa teknologi dapat menyediakan materi pendidikan berkualitas tinggi secara setara tanpa memandang lokasi.

Namun demikian, manfaat teknologi tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan secara merata. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor utama penghambat aksesibilitas. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Dina Zahrotun Ni'mah, Evi Chamalah, dan Aida Azizah (2021), yang menyatakan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran—seperti kemudahan belajar di mana saja dan kapan saja—fakta di lapangan menunjukkan masih banyak siswa yang tidak memiliki perangkat memadai atau koneksi internet yang stabil. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.

Kesenjangan digital juga tampak nyata antara pelajar di perkotaan dan pedesaan. Anshar, Muh. Nadjib M., dan Supratomo (2017) dalam studi mereka menunjukkan bahwa pelajar di kota memiliki akses dan pemanfaatan media baru yang lebih tinggi dibandingkan pelajar di desa. Perbedaan ini bukan hanya terkait fasilitas, tetapi juga menyangkut motivasi, keterampilan, dan dukungan lingkungan. Media baru seperti internet dan aplikasi digital lebih umum digunakan oleh pelajar kota dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial, sementara pelajar di desa masih tertinggal karena hambatan akses dan keterbatasan sumber daya.

Studi lain oleh Hadriyanto, Rifki Aulia Batubara, dan Iman Kasiman Nawireja (2024) meneliti aksesibilitas internet dan dampaknya terhadap literasi digital di kalangan pemuda desa. Mereka menemukan bahwa kepemilikan perangkat digital, biaya internet, dan frekuensi penggunaan internet memiliki korelasi signifikan terhadap keterampilan digital pemuda. Namun menariknya, meskipun penggunaan internet tinggi, belum tentu dibarengi dengan pemahaman etika dalam bermedia digital. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi etika dan budaya digital.

Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, penelitian oleh Nur Azizah, Muhammad Daffa Firiza, Po Abas Sunarya, dan Nur Silawati (2025) menunjukkan bahwa aksesibilitas dan literasi digital memainkan peran besar dalam efektivitas pembelajaran. Mereka menggunakan

pendekatan kuantitatif untuk membuktikan bahwa kemudahan akses terhadap teknologi, dipadukan dengan persepsi positif terhadap teknologi tersebut, meningkatkan tingkat adopsi dan efektivitas pembelajaran digital. Temuan mereka juga menggarisbawahi bahwa peserta didik dari daerah perkotaan lebih mampu mengoptimalkan pembelajaran digital dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan, karena perbedaan infrastruktur dan pengalaman menggunakan teknologi.

Kesimpulan dari berbagai penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas dan literasi digital tidak bisa dipisahkan dalam proses transformasi pendidikan modern. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan inklusif, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur digital yang merata, memberikan pelatihan literasi digital, serta menyediakan perangkat yang terjangkau. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, kesenjangan digital dapat dikurangi dan potensi teknologi dapat dimaksimalkan demi menciptakan masyarakat pembelajar yang cakap secara digital.

7. Inklusi Digital

Dikutip dari (Poerwanti, *dkk.* 2024) Inklusi digital, menurut Sanders (2020), didefinisikan sebagai keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menemukan solusi terkait peluang, akses, pengetahuan, dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, khususnya internet.

Jan van Dijk (2020) menyatakan bahwa inklusi digital dapat tercapai apabila masyarakat memiliki akses motivasi, akses material, akses

keterampilan, dan akses penggunaan, sebab keempat dimensi ini merupakan syarat utama seseorang dapat memanfaatkan teknologi digital secara penuh. Sedangkan ITU (2022) menegaskan bahwa inklusi digital merupakan prinsip menyediakan akses setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan, dengan tujuan mewujudkan konektivitas universal dan akses digital yang bermakna.

Beberapa istilah yang memiliki makna serupa dengan inklusi digital antara lain kapabilitas digital, partisipasi digital, dan literasi digital. Semua istilah ini pada dasarnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup serta membantu mereka mengatasi berbagai keterbatasan yang dimiliki. (The Wales Co-operative Center with Carnegie UK Trust, 2018).

Aspek kunci dalam mewujudkan inklusi digital menurut Dijk (2005) terdiri dari

a. akses motivasi

Merupakan tahap awal dimana individu memiliki dorongan atau keinginan untuk menggunakan teknologi digital. Banyak orang yang enggan menggunakan teknologi karena merasa tidak perlu, takut salah, atau menganggap terlalu rumit. Oleh karena itu, membangun motivasi sangat penting agar penyandang disabilitas maupun masyarakat umum terdorong untuk mencoba memanfaatkan layanan digital.

b. akses material

Berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses teknologi. Misalnya, ketersediaan perangkat (smartphone, komputer), jaringan internet yang memadai, serta infrastruktur pendukung seperti pusat layanan berbasis digital. Bagi penyandang disabilitas, akses material juga mencakup perangkat adaptif seperti *screen reader*, keyboard khusus, atau aplikasi pendukung yang membuat teknologi lebih mudah digunakan.

c. akses keterampilan

Mengacu pada kemampuan individu dalam mengoperasikan teknologi digital secara efektif. Ini mencakup keterampilan dasar (misalnya cara menggunakan smartphone, aplikasi, atau internet) hingga keterampilan tingkat lanjut (seperti memahami keamanan digital, mencari informasi, atau memanfaatkan platform pelatihan daring). Pendidikan digital dan pelatihan khusus menjadi penting agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan kompetensi ini.

d. akses penggunaan

Tahap di mana teknologi digital benar-benar dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekadar memiliki perangkat dan keterampilan, tetapi juga bagaimana individu memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan nyata: mencari informasi, bekerja, berinteraksi sosial, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun layanan publik. Pada level ini, digitalisasi inklusif harus memastikan bahwa

penggunaan teknologi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup, termasuk bagi penyandang disabilitas

Akses motivasi pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap penyandang disabilitas terhadap teknologi. Sementara itu, akses material menunjukkan ketersediaan peluang dan sarana untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, akses keterampilan mencerminkan kemampuan yang diperoleh untuk menggunakan teknologi secara efisien dan efektif. Terakhir, terdapat akses terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri, yang menjadi tahap akhir dalam memastikan teknologi dapat digunakan dengan optimal.

8. Kaitan Relevansi Strategi Pemerintah dengan Administrasi Negara

- a. Administrasi Negara sebagai Fungsi Pemerintahan. Administrasi negara adalah seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Administrasi negara berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara melalui pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola yang baik (*good governance*).
- b. Strategi Pemerintah sebagai Arah Kebijakan. Strategi pemerintah adalah arah, rencana, dan langkah yang dipilih untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional. Strategi ini dapat berupa kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun program prioritas yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.

- c. Kaitan dan Relevansi
- d. Implementasi kebijakan: Strategi pemerintah hanya bisa berjalan efektif melalui administrasi negara, sebab aparatur negara merupakan pelaksana kebijakan publik di lapangan.
- e. Koordinasi dan birokrasi: Administrasi negara menjadi penghubung antara strategi pemerintah di tingkat pusat dengan implementasi di daerah, sehingga strategi yang dirumuskan dapat diwujudkan secara terkoordinasi.
- f. Efisiensi dan efektivitas: Administrasi negara memastikan strategi pemerintah dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang tepat, transparan, dan akuntabel.
- g. Pelayanan publik: Strategi pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan digitalisasi, misalnya, hanya bisa dirasakan masyarakat jika administrasi negara mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan merata.
- h. Evaluasi dan pengawasan: Administrasi negara berfungsi untuk menilai apakah strategi pemerintah berjalan sesuai sasaran atau perlu diperbaiki melalui mekanisme akuntabilitas publik.
- i. Contoh Konkret
- j. Transformasi digital nasional: Pemerintah merancang strategi digitalisasi pelayanan publik. Relevansinya dengan administrasi

negara adalah terletak pada birokrasi digital, e-government, dan sistem pelayanan terpadu.

- k. Pembangunan berkelanjutan (SDGs): Pemerintah menyusun strategi pembangunan hijau, sedangkan administrasi negara bertugas mengoordinasikan program lingkungan di kementerian, daerah, dan masyarakat.
- l. Reformasi birokrasi: Strategi pemerintah adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional, administrasi negara menjadi instrumen untuk melaksanakan reformasi tersebut.

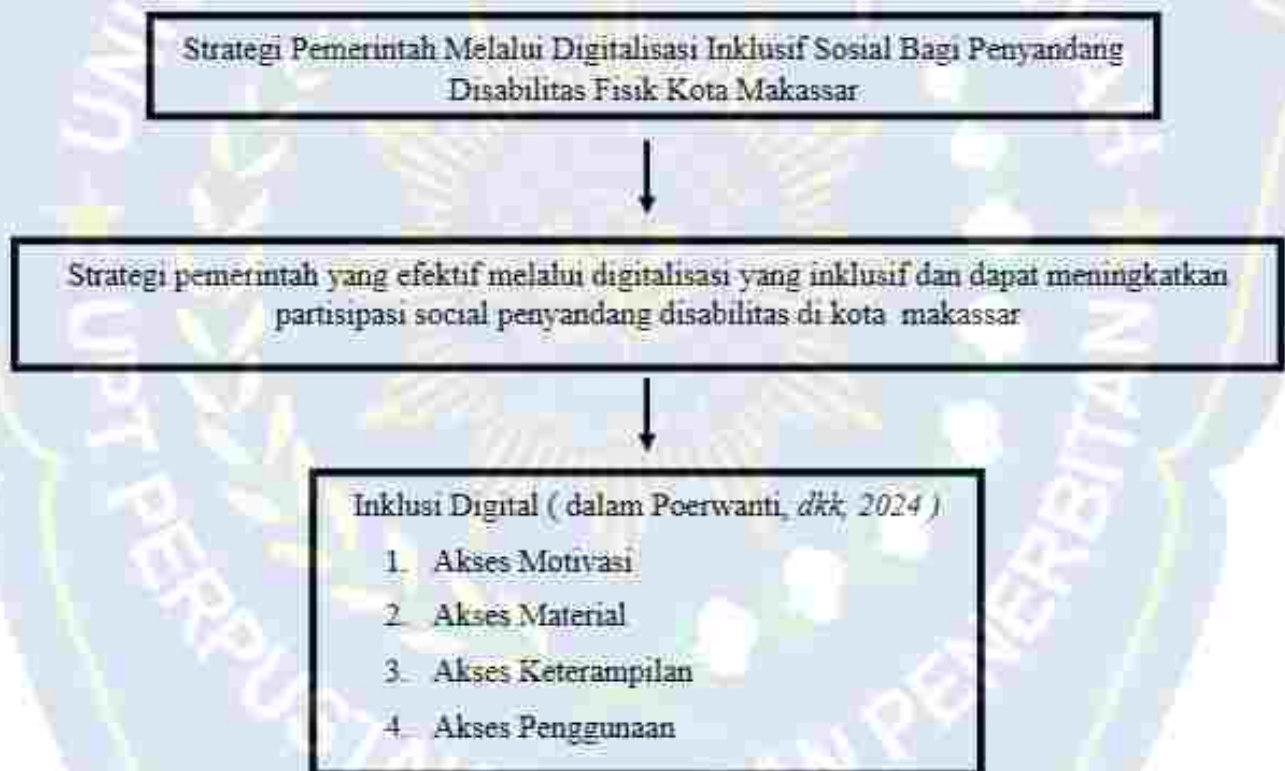
Kesimpulannya, strategi pemerintah memberikan arah dan tujuan, sedangkan administrasi negara menyediakan sistem, mekanisme, dan sumber daya untuk melaksanakan strategi tersebut. Tanpa administrasi negara, strategi hanya akan berhenti di atas kertas; sebaliknya, tanpa strategi, administrasi negara kehilangan orientasi dalam melayani masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, fokus utama penelitian ini adalah strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Penelitian ini menekankan bagaimana strategi adalah strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial yang dikembangkan terkait dengan program digitalisasi pendidikan dapat

meningkatkan aksesibilitas layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Kerangka pikir ini menggambarkan hubungan antara kondisi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, tantangan aksesibilitas, strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial, dan hasil yang diharapkan berupa peningkatan partisipasi sosial dan kualitas hidup penyandang disabilitas fisik. Berikut skema kerangka konsep penelitian:



Gambar.I Kerangka Pikir

D. Fokus Penelifian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan sosial, pemberdayaan

ekonomi, dan partisipasi sosial mereka. Dalam konteks pembangunan kota inklusif, penyandang disabilitas fisik merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas umum, transportasi, layanan publik, serta kesempatan kerja.

Strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial diyakini dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi hambatan tersebut. Aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh informasi, mengakses layanan sosial, serta mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian mereka. Penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi informasi digitalisasi, mulai dari keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman inklusi di kalangan pengembang, hingga tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah.

Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kondisi aksesibilitas saat ini, analisis strategi yang efektif dalam perancangan dan implementasi informasi digitalisasi, serta dampak potensial dari digitalisasi inklusif sosial terhadap peningkatan kualitas hidup dan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan inovasi teknologi yang lebih ramah disabilitas.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusi sosial yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik di kota Makassar, dengan menggunakan kerangka teori inklusif digital yang melibatkan 4 komponen utama : Akses motivasi, akses material, akses keterampilan dan akses penggunaan.

1. Mengidentifikasi tingkat akses motivasi

Yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik untuk mampu mengakses informasi terkait digitalisasi inklusi sosial berbasis teknologi di Kota Makassar. Akses motivasi mencakup faktor psikologis dan sosial yang mendorong individu untuk mengadopsi teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

2. Menilai akses material yang tersedia

Seperti perangkat keras (smartphone, komputer) dan koneksi internet yang dapat mendukung informasi digital oleh penyandang disabilitas fisik. Akses material menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa perangkat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas fisik.

3. Menganalisis akses keterampilan

Akses keterampilan merupakan aspek krusial dalam strategi digitalisasi inklusi sosial. Pemerintah perlu memastikan penyandang disabilitas fisik memperoleh literasi digital melalui pelatihan dan

pendampingan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan teknologi tidak sekadar formalitas, melainkan sarana pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam layanan sosial digital

4. Menilai akses penggunaan digitalisasi sosial

Akses penggunaan menekankan sejauh mana penyandang disabilitas fisik. Strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusi sosial harus memastikan bahwa teknologi tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dioperasikan, relevan dengan kebutuhan, serta memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan selama periode dua bulan, terhitung sejak dari awal Agustus hingga akhir Oktober 2025.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena sosial yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, sehingga membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi aksesibilitas layanan sosial, tantangan dalam pemerintah melalui digitalisasi, serta strategi yang efektif dalam implementasinya.

Berdasarkan Sugriono (2018:15), Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam situasi alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan fenomena yang terjadi berdasarkan data

yang tersedia diperoleh secara apa adanya, sehingga menghasilkan potret mendalam mengenai situasi yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perilaku, persepsi, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi inklusif sosial oleh penyandang disabilitas.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipandang tepat dalam penelitian ini karena memungkinkan pengumpulan informasi secara mendalam dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pengembang aplikasi, komunitas disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi inovasi teknologi dalam mendukung inklusi sosial di Kota Makassar. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena fokusnya adalah untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara rinci tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang ada.” Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, sehingga membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi aksesibilitas layanan sosial, tantangan pemerintah terhadap digitalisasi, serta strategi yang efektif dalam implementasinya.

Menurut Sugiyono (2018:15), penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan mempelajari objek dalam situasi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan informasi dan data yang tersedia diperoleh secara apa adanya, sehingga

menghasilkan potret mendalam mengenai situasi yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perilaku, persepsi, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi inklusif sosial oleh penyandang disabilitas.

Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dianggap tepat untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, pengembang aplikasi, komunitas disabilitas, dan masyarakat umum, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran inovasi teknologi dalam mendukung inklusi sosial di Kota Makassar.

C. Informan

Informan dalam studi ini terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan digitalisasi untuk mendukung inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan paling mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Informan penelitian ini mencakup:

Table 3.1 Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Staf Dinas Sosial	2
2	Orang tua Penyandang Disabilitas	3
3	Anak Berkebutuhan Khusus	3
Jumlah		8

Dengan melibatkan informan utama dan pendukung tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data secara menyeluruh dan mendalam mengenai strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

D. Sumber Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi di lapangan yang terkait dengan aksesibilitas dan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Pengamatan ini mencakup fasilitas publik, layanan sosial, sarana transportasi, dan kegiatan pemberdayaan disabilitas yang terhubung dengan pengembangan program aplikasi inklusif sosial. Tujuan dari observasi ini adalah memperoleh informasi nyata mengenai hambatan dan peluang yang ada di lapangan sebagai data pendukung penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan kunci, yaitu penyandang disabilitas fisik, pengembang aplikasi, pihak pemerintah terkait, dan komunitas disabilitas di Kota Makassar. Teknik wawancara yang digunakan adalah guided interview, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi pengalaman dan pendapat informan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami tantangan, kebutuhan, serta strategi efektif dalam pengembangan dan implementasi aplikasi inklusif sosial.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen resmi, foto, dan laporan kegiatan, peraturan, dan data statistik terkait penyandang disabilitas di Kota Makassar. Dokumen yang dikumpulkan termasuk laporan Dinas Sosial, data dari Unit Layanan Disabilitas (ULD), program pemberdayaan ekonomi, serta dokumentasi kegiatan komunitas disabilitas. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan bukti autentik yang mendukung analisis penelitian.

E. Teknik Pengabsahan Data

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan di lapangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Proses ini penting agar data yang dikumpulkan akurat, dapat dipercaya, dan mampu menggambarkan situasi nyata terkait strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, teknik validasi data yang diterapkan meliputi pemeriksaan kembali oleh informan (member check), triangulasi sumber, serta konsultasi dengan para ahli. Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali data hasil wawancara dan observasi kepada para informan, seperti penyandang disabilitas fisik, pihak pemerintah, pengembang aplikasi, dan komunitas disabilitas, sehingga informasi yang diperoleh peneliti sesuai dengan maksud informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi Misalnya, informasi mengenai kondisi aksesibilitas penyandang disabilitas di fasilitas publik dibandingkan dengan dokumen resmi dari Dinas Sosial dan hasil pengamatan lapangan. Sementara itu, konsultasi ahli dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan pembimbing atau tenaga ahli untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran perbaikan sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan menerapkan ketiga teknik ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

F. Teknik Analisis Data

Studi ini menerapkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam terkait kondisi aksesibilitas, kendala, serta strategi pengembangan program aplikasi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar Pendekatan ini sesuai dengan tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles, Huberman, & Saldana (2018) yang meliputi tiga tahap utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data dari lapangan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga pola, hubungan, dan makna dari data dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan oleh peneliti untuk menginterpretasikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai

strategi pengembangan aplikasi inklusif sosial dan dampaknya terhadap peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

1. Kondensasi data

Menurut Wokas dkk. (2022), data condensation adalah merupakan proses untuk menyeleksi, menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mentransformasikan data agar mendekati keseluruhan informasi. Proses ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta materi empiris lainnya. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan meringkas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengaitkan informasi yang diperoleh agar saling mendukung dan membentuk gambaran yang utuh.”

2. Penyajian data

Data kualitatif dapat disajikan melalui bentuk narasi teks, catatan lapangan, matriks, grafik, diagram jaringan, atau bagan. Dengan cara ini, data menjadi terstruktur dan hubungan antar informasi dapat terlihat lebih jelas, sehingga memudahkan pemahaman. Selain itu, penyajian data memungkinkan penulis untuk mengaitkan temuan dengan teori yang relevan dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Wokas dkk. (2022) menjelaskan bahwa “menarik simpulan atau verifikasi (concluding drawing and verification) penulis melakukan tahapan

kualifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya berdasarkan kualifikasi data yang telah dibuat²⁷. Pada proses ini, penulis melakukan tahapan kualifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya berdasarkan kualifikasi data yang telah dibuat oleh penulis.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkedudukan di wilayah administrasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.

Secara astronomis, Kota Makassar berada pada posisi:

- $5^{\circ} 8' - 5^{\circ} 14'$ Lintang Selatan
- $119^{\circ} 24' - 119^{\circ} 32'$ Bujur Timur

Wilayah Kota Makassar berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Maros

Sebelah Timur : Kabupaten Maros

Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa

Sebelah Barat : Selat Makassar

Adapun kantor Dinas Sosial Kota Makassar saat ini beralamat di Jl. A. P. Pettarani No. 72, Makassar, Sulawesi Selatan 90222, yang secara strategis berada di pusat kota sehingga memudahkan koordinasi pelayanan sosial terhadap masyarakat.

2. Profil Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dalam membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Lembaga ini berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program kesejahteraan sosial, terutama yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta penanganan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kota Makassar memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain: merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penanganan bencana sosial, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, dinas ini juga mengelola program bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan sosial di Kota Makassar.

Kantor Dinas Sosial Kota Makassar berlokasi di Jl. A. P. Pettarani No. 72, Makassar, Sulawesi Selatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat, beberapa bidang teknis, serta unit pelaksana teknis di lapangan. Dengan visi mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Sosial Kota Makassar senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

a. Visi

Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' dan Smart City dengan Imunitas Kuta untuk Semua

b. Misi

- 1) Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
- 2) Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
- 3) Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang Sombere' dan Smart City untuk Semua.

4. Struktur Birokrasi Dinas Sosial Kota Makassar



5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 89).

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

a. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang sosial; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas;

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 4) Pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS. Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan operasional kegiatan di bidang usaha kesejahteraan Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial ;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di idangusaha kesejahteraan sosial;

- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perencanaan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi sosial;

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) Pengoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait tugas dan fungsinya;

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi:

- 1) Seksi Pelayanan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen
- 2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang rehabilitasi sosial;;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang rehabilitasi sosial;
- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat: cacat fisik(cacat tubuh, cacat netra, cacat rung wucara, cacat eks penyakit kronis eks kusta), cacat mental (cacat retardasi, eks psikotik, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, anak nakal eks napi) dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migram;
- 5) Menyusun rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang cacat;
- 6) Menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susial, tuna wisma, waria, eks narapidana dan anak nakal);

- 7) Menyusun rencana dan program pelayanan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- 8) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
- 9) Menyiapkan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban napza dan pengidap HIV/AIDS;
- 10) Menyusun rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup kota ;
- 11) Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;
- 15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan operasinal di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai keahlawanan, keprintisan dan kejuanagan serta kesetiakawanan sosial.

Kepala Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan operasinal di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

g. Jabatan Fungsional

Dilingkungan Dinas Kota Makassar dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar. Dalam hal ini dapat di kaitkan dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Inklusi Digital Poerwanti, dkk, 2024) yaitu : Akses Motivasi, Akses Material, Akses Keterampilan, Akses Penggunaan.

Berikut adalah data penyandang Disabilitas tahun 2022-2025 di Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	2022	30.400
2	2023	30.373
3	2024	30.028

(Sumber : Bappelitbangda Makassar, Dinas Sosial)

1. Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Akses motivasi memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik di era digital. Dorongan internal seperti rasa ingin tahu, kebutuhan akan ilmu, serta harapan untuk mandiri menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk tetap semangat belajar meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Di sisi lain, dukungan eksternal dari keluarga, guru, komunitas, dan pemerintah juga berperan besar dalam memberikan semangat serta kepercayaan diri agar penyandang disabilitas berani memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendidikan. Motivasi yang kuat ini membuat mereka lebih terbuka untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran modern yang berbasis digital.

Dalam praktiknya, akses motivasi tercermin dari kemauan siswa disabilitas untuk mempelajari keterampilan digital yang mendukung kegiatan belajar, keyakinan bahwa teknologi dapat memudahkan mereka memahami materi pelajaran, serta keberanian untuk menggunakan platform pendidikan daring atau aplikasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya memengaruhi partisipasi mereka dalam pembelajaran, tetapi juga membangun keyakinan

bahwa teknologi dapat menjadi jalan menuju kemandirian dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Dengan demikian, akses motivasi berperan sebagai pondasi utama agar penyandang disabilitas fisik mampu memanfaatkan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara terkait Identifikasi Tingkat Akses Motivasi dari Seorang Penyandang Disabilitas :

"Sejak sekolah saya memang sering merasa tertinggal karena keterbatasan fisik. Kadang saya malu kalau tidak bisa ikut kegiatan seperti teman-teman lain. Tapi waktu guru memperkenalkan komputer di sekolah, saya mulai sadar kalau lewat teknologi saya bisa belajar dengan cara yang lebih mudah. Dari situ muncul motivasi, bahwa keterbatasan bukan berarti saya tidak bisa maju." (Hasil Wawancara dengan RT, 21 Agustus 2025)

Ia menjelaskan bahwa pendidikan, baik di sekolah maupun di luar, membuatnya termotivasi untuk terus belajar menggunakan teknologi:

"Dulu saya cuma bisa baca buku pelan-pelan. Tapi setelah tahu ada aplikasi pembaca layar dan e-book, saya jadi lebih semangat belajar. Rasanya seperti dapat pintu baru untuk mengakses ilmu. Saya jadi termotivasi untuk tidak berhenti sekolah, karena sekarang saya bisa belajar mandiri lewat teknologi." (Hasil Wawancara dengan RT, 21 Agustus 2025)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam menumbuhkan motivasi penyandang disabilitas fisik untuk memanfaatkan teknologi. Pengenalan komputer, aplikasi pembaca layar, dan e-book membuat mereka lebih percaya diri, semangat belajar, serta menyadari bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk maju.

Selanjutnya wawancara dengan orang tua murid penyandang disabilitas,

"Sebagai orang tua, saya ingini anak saya tetap bisa sekolah dan punya masa depan yang baik. Saya tahu keterbatasan fisiknya membuat dia sering minder, apalagi kalau dibandingkan dengan teman-temannya. Tapi saya selalu katakan, pendidikan itu penting, dan sekarang teknologi bisa membantu. Misalnya, saya ajarkan cara pakai HP untuk cari materi pelajaran di YouTube atau aplikasi belajar. Walaupun dia belajar pelan-pelan, saya lihat motivasinya tumbuh. Dia jadi lebih percaya diri karena bisa ikut belajar seperti teman-temannya." (Hasil Wawancara dengan Ibu NY, 21 Agustus 2025)

Orang tua ini juga menambahkan bahwa dukungan keluarga adalah kunci agar anak tetap bersemangat:

"Kalau anak menyerah, saya selalu beri dorongan. Saya bilang, teknologi itu alat, kalau kita bisa gunakan dengan baik, pendidikan jadi lebih mudah. Dukungan keluarga sangat penting, karena anak butuh diyakinkan bahwa dia mampu. Dari situ motivasinya muncul." (Hasil Wawancara dengan Ibu NY, 21 Agustus 2025)

Dukungan keluarga, khususnya orang tua, berperan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar penyandang disabilitas fisik. Melalui dorongan emosional dan bimbingan penggunaan teknologi, anak merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk terus menempuh pendidikan meski memiliki keterbatasan fisik.

Seorang staf Dinas Sosial Kota Makassar menyampaikan perannya dalam mendukung pendidikan inklusif berbasis digital:

"Kami melihat bahwa motivasi penyandang disabilitas fisik dalam mengakses pendidikan berbasis digital sangat besar, hanya saja sering terkendala keterampilan dan fasilitas. Karena itu, kami membuat program pelatihan literasi digital, supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Tujuan kami bukan hanya mengenalkan aplikasi, tetapi juga membangun semangat belajar bahwa mereka punya hak yang sama dalam pendidikan." (Hasil Wawancara dengan Ibu HA, 22 Agustus 2025)

Ibu HA juga menekankan bahwa pendidikan digital menjadi kunci untuk kemandirian:

"Ketika mereka mengikuti pelatihan, kami melihat antusiasme yang tinggi. Ada rasa percaya diri yang tumbuh karena mereka tahu bisa belajar dan mandiri dengan bantuan teknologi. Inilah yang kami sebut akses motivasi dorongan psikologis dan sosial yang muncul karena adanya kesempatan pendidikan inklusif. Ke depan, kami ingin memperluas program ini supaya semakin banyak penyandang disabilitas yang termotivasi untuk belajar." (Hasil Wawancara dengan Ibu HA, 22 Agustus 2025)

Program pelatihan literasi digital dari Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar penyandang disabilitas fisik. Melalui pendidikan digital yang inklusif, mereka tidak hanya memperoleh keterampilan teknologi, tetapi juga tumbuh rasa percaya diri dan semangat untuk mandiri, sehingga pendidikan menjadi lebih setara dan berkeadilan.

Kesimpulan dari ketiga narasumber tersebut adalah bahwa pendidikan, dukungan keluarga, dan program pelatihan literasi digital berperan saling melengkapi dalam menumbuhkan motivasi belajar penyandang disabilitas fisik. Pengenalan teknologi memberikan keterampilan dan kepercayaan diri, dukungan keluarga memperkuat semangat belajar melalui bimbingan dan dorongan emosional, sedangkan program pemerintah melalui pelatihan digital menciptakan kesempatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan sinergi ketiga aspek ini, penyandang disabilitas fisik mampu mengatasi keterbatasan dan memiliki peluang yang lebih setara dalam pendidikan maupun kemandirian hidup.

2. Menilai Akses Material yang Tersedia

Akses material memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik. Dalam era digital, perangkat teknologi seperti laptop, smartphone, atau tablet menjadi sarana utama untuk mengakses pembelajaran daring. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan terjangkau juga menentukan sejauh mana peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal. Tanpa adanya perangkat dan jaringan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara akan sangat terbatas.

Bagi penyandang disabilitas fisik, akses material dalam pendidikan tidak hanya berupa perangkat teknologi, tetapi juga meliputi fasilitas pendukung seperti software pembaca layar, aplikasi ramah disabilitas, dan ruang belajar yang inklusif. Infrastruktur sekolah maupun pusat belajar berbasis digital perlu dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas, sehingga siswa dengan keterbatasan fisik tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan. Dengan demikian, akses material menjadi kunci utama agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setara melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut wawancara dari indikator akses material, Penyandang Disabilitas Fisik

“Saya sebenarnya ingin sekali ikut kelas online, tapi kadang kesulitan karena hanya punya handphone lama dan jaringan internet sering terputus. Kalau ada laptop atau perangkat yang lebih mendukung, pasti saya lebih mudah belajar dan mengikuti pelatihan digital.” (Hasil Wawancara dengan BY, 22 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka di simpulkan Penyandang disabilitas

fisik memiliki semangat tinggi untuk mengikuti pembelajaran digital, namun keterbatasan perangkat dan jaringan internet menjadi hambatan utama. Dukungan berupa laptop atau perangkat memadai sangat dibutuhkan agar mereka bisa mengoptimalkan proses belajar.

Selanjutnya wawancara dari orang tua murid,

"Kami berusaha mendukung anak kami dengan menyediakan kuota internet dan membelikan ponsel, meskipun sederhana. Bagi kami, yang penting anak bisa belajar dan tetap terhubung dengan dunia luar. Namun, kalau ada bantuan perangkat yang lebih memadai dari pemerintah, tentu akan sangat membantu." (Hasil Wawancara dengan DW, 22 Agustus 2025)

Keluarga berperan penting dalam menyediakan dukungan material seperti kuota internet dan ponsel, meski dengan keterbatasan ekonomi. Bantuan tambahan dari pemerintah dalam bentuk perangkat digital akan memperkuat motivasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pendidikan maupun aktivitas sosial.

Berikut wawancara bersama Staff Dinas Sosial dalam indikator akses material,

"Kami menyadari bahwa akses material masih menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, melalui program inklusi sosial berbasis digital, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas pendukung, mulai dari pelatihan berbasis teknologi hingga penyediaan perangkat yang ramah disabilitas. Tujuannya agar mereka tidak hanya memiliki motivasi, tetapi juga sarana nyata untuk mengakses teknologi." (Hasil Wawancara dengan Ibu NN, 22 Agustus 2025)

Dinas Sosial menyadari bahwa akses material menjadi kendala besar bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan program berbasis digital serta perangkat ramah disabilitas untuk memastikan mereka memiliki sarana nyata dalam memanfaatkan teknologi.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa penyandang disabilitas fisik

memiliki motivasi tinggi untuk belajar melalui pembelajaran digital, tetapi keterbatasan perangkat dan jaringan internet menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga dalam bentuk penyediaan kuota internet dan ponsel, meskipun terbatas, tetap berperan penting dalam menunjang proses belajar. Sementara itu, peran pemerintah melalui Dinas Sosial sangat dibutuhkan untuk menghadirkan solusi konkret, seperti penyediaan perangkat digital yang ramah disabilitas dan program berbasis teknologi. Dengan adanya sinergi antara semangat individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, penyandang disabilitas fisik dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara dan inklusif.

3. Menganalisis Akses Keterampilan

Akses keterampilan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan penyandang disabilitas fisik di era digital. Kemampuan untuk mengoperasikan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan aplikasi pembelajaran daring menentukan sejauh mana mereka dapat mengikuti pembelajaran secara setara dengan siswa lain. Literasi digital dasar seperti mengetik, menggunakan aplikasi konferensi video, serta mengakses platform e-learning menjadi bekal utama bagi siswa penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan teknologi sebagai media belajar.

Namun, keterbatasan akses terhadap pelatihan khusus membuat banyak penyandang disabilitas belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Oleh karena itu, peran sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah sangat penting dalam menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang

inklusif. Dengan adanya pelatihan yang terarah, penyandang disabilitas fisik tidak hanya mampu memahami materi pelajaran dengan lebih baik, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan pendidikan. Hal ini akan membuka peluang bagi terciptanya pendidikan yang setara, inklusif, dan berkeadilan. Berikut hasil wawancara terkait analisis akses keterampilan. Berikut hasil wawancara dengan Penyandang Disabilitas Fisik (Siswa) terkait indikator Akses keterampilan.

"Saya sebenarnya senang sekali kalau ada pelajaran yang menggunakan teknologi, seperti belajar lewat video atau aplikasi online. Tapi kadang saya merasa kesulitan karena tidak terlalu paham cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Misalnya, waktu guru meminta kami mengirim tugas lewat Google Classroom, saya sering bingung bagaimana cara mengunggah file. Kalau ada pelatihan khusus atau guru yang membimbing lebih sabar, tentu saya bisa lebih cepat belajar. Saya punya keinginan untuk bisa mahir menggunakan laptop, karena saya tahu itu akan membantu saya bukan hanya di sekolah, tapi juga nanti kalau sudah bekerja." (Hasil Wawancara dengan FJR, 22 Agustus 2025)

Siswa penyandang disabilitas memiliki semangat tinggi untuk belajar menggunakan teknologi, namun keterbatasan keterampilan digital dasar membuat mereka sering kesulitan. Mereka membutuhkan bimbingan khusus dan pelatihan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pendidikan.

Dilanjutkan dengan wawancara orang tua murid,

"Kami melihat anak kami punya semangat belajar yang tinggi, tapi seringkali terkendala keterampilan digital. Misalnya, saat sekolah meminta anak menggunakan aplikasi Zoom atau mengakses materi pembelajaran daring, dia sering minta bantuan kami. Jujur saja, kami juga tidak terlalu menguasai teknologi, sehingga hanya bisa membantu sebatas yang kami tahu. Karena itu, kami berharap sekolah atau pemerintah bisa menyediakan pelatihan keterampilan

digital khusus untuk siswa disabilitas. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya sekadar memiliki perangkat, tapi juga bisa menggunakannya dengan baik untuk mendukung pendidikan mereka" (Hasil Wawancara dengan LN, 22 Agustus 2025)

Keluarga berperan dalam memberikan dukungan, namun keterbatasan pengetahuan teknologi membuat mereka tidak maksimal membantu. Dukungan dari sekolah dan pemerintah berupa pelatihan sangat dibutuhkan agar siswa disabilitas memiliki keterampilan digital yang memadai.

Staff Dinas Sosial Ibu NN,

"Kami menyadari bahwa keterampilan digital merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung pendidikan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik. Tidak cukup hanya menyediakan perangkat atau akses internet, karena tanpa keterampilan, perangkat itu tidak akan maksimal digunakan. Oleh karena itu, kami sedang berusaha merancang program literasi digital yang inklusif, di mana siswa disabilitas bisa mendapatkan pelatihan keterampilan dasar hingga lanjutan sesuai kebutuhan mereka. Kami juga menggandeng sekolah inklusi dan komunitas disabilitas untuk memastikan pelatihan ini tepat sasaran. Dengan keterampilan digital yang memadai, siswa penyandang disabilitas diharapkan mampu mengikuti pembelajaran daring secara mandiri, mengerjakan tugas dengan percaya diri, dan pada akhirnya bisa bersaing secara setara dengan siswa lainnya." (Hasil Wawancara dengan NN, 22 Agustus 2025)

Pemerintah menyadari bahwa keterampilan digital adalah kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Program literasi digital inklusif sedang diupayakan agar penyandang disabilitas dapat belajar mandiri, percaya diri, dan bersaing setara dengan siswa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara maka disimpulkan bahwa siswa penyandang disabilitas memiliki motivasi tinggi untuk belajar dengan teknologi, tetapi

keterbatasan keterampilan digital dasar menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga penting namun terbatas karena kurangnya pengetahuan teknologi, sehingga diperlukan peran sekolah dan pemerintah dalam menyediakan bimbingan serta pelatihan. Melalui program literasi digital inklusif, penyandang disabilitas dapat meningkatkan keterampilan, belajar secara mandiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk bersaing secara setara dengan siswa lainnya.

4. Menilai akses penggunaan Digitalisasi Sosial

Menilai akses penggunaan digitalisasi sosial adalah proses untuk mengetahui sejauh mana individu atau kelompok, termasuk penyandang disabilitas, mampu memanfaatkan layanan, program, serta sarana digital yang disediakan pemerintah maupun masyarakat. Penilaian ini mencakup kemudahan penggunaan teknologi, ketersediaan perangkat dan jaringan, keterampilan digital, serta dukungan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah memastikan bahwa digitalisasi benar-benar dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua kalangan, sehingga tercipta keadilan sosial, partisipasi aktif, serta peningkatan kualitas hidup melalui teknologi yang inklusif. Berikut wawancara Penyandang Disabilitas terkait indikator Menilai akses penggunaan Digitalisasi Sosial,

“Saya sangat senang bisa menggunakan handphone untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan teman. Tapi kadang saya kesulitan karena tidak semua aplikasi mudah diakses, dan jaringan internet sering putus. Kalau ada aplikasi yang lebih ramah untuk penyandang disabilitas, saya pasti bisa lebih percaya diri dalam belajar.” (Hasil Wawancara dengan FZ, 22 Agustus 2025)

Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi menggunakan teknologi,

namun masih menghadapi kendala pada aksesibilitas aplikasi dan kualitas jaringan internet.

Dilanjutkan dengan pernyataan orang tua murid,

"Teknologi sangat membantu, apalagi saat anak saya sulit ikut belajar tatap muka. Dengan aplikasi belajar online, dia tetap bisa mengikuti pelajaran. Hanya saja, kami sering terkendala biaya untuk kuota internet dan tidak semua keluarga mampu menyediakan laptop. Kami berharap ada bantuan perangkat dari pemerintah agar anak-anak disabilitas bisa belajar lebih maksimal." (Hasil Wawancara dengan Ibu UN, 22 Agustus 2025).

Dukungan keluarga sangat penting, namun keterbatasan ekonomi dan fasilitas membuat peran mereka belum maksimal tanpa adanya bantuan tambahan dari pihak luar.

Selanjutnya wawancara dengan staff dinas sosial ibu NN,

"Kami menyadari bahwa digitalisasi sosial adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Saat ini, kami telah melaksanakan beberapa program literasi digital inklusif dan mulai menyediakan perangkat ramah disabilitas. Harapan kami, dengan dukungan ini, penyandang disabilitas bisa lebih mudah belajar, berkomunikasi, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari." (Hasil Wawancara dengan Ibu NN, 22 Agustus 2025).

Pemerintah berupaya meningkatkan akses digital melalui pelatihan dan penyediaan perangkat, meski masih perlu diperluas agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Kesimpulan dari hasil wawancara indicator Menilai akses penggunaan Digitalisasi Sosial adalah bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi tinggi dalam memanfaatkan teknologi, namun masih terkendala pada aksesibilitas aplikasi dan jaringan internet. Peran keluarga turut mendukung, tetapi terbatas oleh kondisi ekonomi dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu,

peran pemerintah melalui pelatihan dan penyediaan perangkat digital sangat diperlukan, dengan cakupan yang lebih luas agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat digitalisasi secara merata dan inklusif.

C. Pembahasan

1. Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Transformasi pendidikan di era digital membawa peluang baru bagi penyandang disabilitas fisik untuk mengembangkan potensi diri. Semangat belajar mereka didorong oleh motivasi yang bersumber dari dua hal, yaitu keinginan pribadi untuk mandiri dan berkembang, serta dukungan lingkungan sekitar. Dari sisi personal, penyandang disabilitas menunjukkan tekad yang kuat untuk memperoleh ilmu dan keterampilan meskipun terbatas secara fisik. Sedangkan dari sisi eksternal, peran keluarga, tenaga pendidik, komunitas, dan pemerintah berfungsi sebagai penopang yang menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus memberikan akses nyata pada teknologi.

Motivasi tersebut tampak dalam partisipasi aktif mereka untuk mempelajari keterampilan digital, kesiapan memanfaatkan aplikasi pendidikan daring, serta keyakinan bahwa teknologi mampu menjadi jembatan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi yang kuat, penyandang disabilitas tidak hanya sekadar ikut serta dalam pendidikan digital, tetapi juga menempatkan teknologi sebagai sarana penting menuju kesetaraan dan kemandirian.

Wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak memperlihatkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang saling mendukung. Pertama,

pendidikan berbasis teknologi memberi peluang baru sekaligus membangun rasa percaya diri. Kedua, keluarga memberikan dukungan moral dan material, walaupun masih terbatas oleh faktor ekonomi. Ketiga, pemerintah melalui program literasi digital inklusif berusaha memperluas akses dan menyediakan sarana yang lebih ramah disabilitas. Ketiga aspek ini membentuk sinergi yang mampu memperkuat motivasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan teknologi digital.

Dengan demikian, motivasi dapat dipandang sebagai inti dari proses inklusi pendidikan digital. Ketika motivasi internal diperkuat oleh dukungan eksternal, penyandang disabilitas fisik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang setara, meningkatkan kemandirian, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial.

2. Menilai Akses Material yang Tersedia

Keadilan akses pendidikan di era digital sangat bergantung pada tersedianya material pendukung yang memadai, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik. Perangkat teknologi dan jaringan internet bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan menjadi instrumen utama agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran daring secara optimal. Tanpa dukungan material tersebut, kesenjangan pendidikan akan semakin nyata karena siswa dengan keterbatasan fisik sulit memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan siswa lainnya.

Selain itu, akses material bagi penyandang disabilitas tidak hanya mencakup perangkat umum seperti laptop atau ponsel, melainkan juga sarana khusus yang mendukung keterbatasan mereka, seperti aplikasi ramah disabilitas, software

pembaca layar, serta fasilitas belajar yang inklusif. Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus agar penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar.

Berdasarkan hasil analisis, meskipun penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran digital, keterbatasan perangkat dan jaringan masih menjadi kendala utama. Peran keluarga tetap penting melalui dukungan sederhana seperti penyediaan kuota internet atau gawai, walaupun sering kali terbatas oleh kondisi ekonomi. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan solusi yang nyata, baik berupa bantuan perangkat ramah disabilitas maupun pelatihan literasi digital. Dengan adanya kolaborasi antara semangat individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, maka pendidikan digital yang setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat terwujud.

3. Menganalisis Akses Keterampilan

Peningkatan keterampilan digital merupakan salah satu langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di era pendidikan modern. Kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, baik komputer, smartphone, maupun aplikasi pembelajaran daring, menjadi penentu apakah mereka dapat mengikuti proses belajar secara sejajar dengan peserta didik lainnya. Penguasaan literasi digital dasar seperti penggunaan aplikasi konferensi video, mengetik, hingga mengakses platform e-learning memberikan peluang besar bagi penyandang disabilitas untuk lebih mudah memahami materi pelajaran sekaligus

memperluas ruang belajar mereka

Meski demikian, hambatan yang sering muncul adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan khusus yang relevan dengan kebutuhan mereka. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam menguasai keterampilan digital karena minimnya bimbingan terarah. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah menjadi sangat krusial dalam menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui dukungan tersebut, penyandang disabilitas fisik dapat lebih percaya diri, aktif berpartisipasi, dan memiliki kesempatan yang lebih setara dalam pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa meskipun siswa penyandang disabilitas memiliki semangat tinggi untuk belajar menggunakan teknologi, keterbatasan keterampilan digital dasar masih menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga memberi peran penting dalam mendampingi, namun sering kali terbatas oleh kurangnya pengetahuan teknologi. Karena itu, intervensi sekolah dan pemerintah dalam bentuk pelatihan literasi digital menjadi sangat dibutuhkan. Dengan adanya program literasi digital inklusif, penyandang disabilitas tidak hanya mampu menguasai teknologi, tetapi juga dapat belajar mandiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan bersaing secara setara dengan siswa lain.

4. Menilai Akses Penggunaan Digitalisasi Sosial

Digitalisasi sosial pada dasarnya bertujuan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi setiap individu agar dapat berpartisipasi aktif dalam pendidikan maupun kehidupan sosial, termasuk bagi penyandang disabilitas fisik. Menilai

akses penggunaannya berarti melihat apakah teknologi yang disediakan—baik berupa perangkat, jaringan internet, maupun aplikasi pembelajaran—benar-benar dapat digunakan secara mudah, adil, dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya menjadi inovasi, tetapi juga sarana nyata untuk mendorong kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun penyandang disabilitas fisik memiliki antusiasme tinggi untuk belajar melalui teknologi, mereka masih menghadapi kendala pada keterbatasan aplikasi yang ramah disabilitas dan kualitas jaringan internet. Keluarga tetap memberikan dukungan semampunya, namun kondisi ekonomi yang terbatas membuat peran mereka belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan hadir melalui program pelatihan digital dan penyediaan perangkat yang lebih inklusif. Dengan langkah tersebut, manfaat digitalisasi sosial dapat dirasakan secara adil, merata, dan benar-benar mendukung terciptanya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Motivasi belajar penyandang disabilitas fisik tumbuh melalui sinergi pendidikan, dukungan keluarga, dan pelatihan literasi digital pemerintah. Teknologi memberi keterampilan dan rasa percaya diri, keluarga memberikan dorongan emosional, sedangkan pemerintah membuka akses inklusif. Kombinasi ketiganya memungkinkan penyandang disabilitas mengatasi keterbatasan, memperoleh pendidikan setara, dan meningkatkan kemandirian.

2. Menilai Akses Material yang Tersedia

Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran digital, namun masih terkendala perangkat dan jaringan internet. Dukungan keluarga tetap membantu meski terbatas, sedangkan pemerintah perlu hadir dengan solusi nyata melalui penyediaan fasilitas digital ramah disabilitas dan program pelatihan. Dengan kolaborasi antara motivasi individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, tercipta peluang pendidikan yang lebih inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas fisik.

3. Menganalisis Akses Material Yang Tersedia

Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar, namun keterbatasan keterampilan digital dasar menjadi kendala utama. Dukungan keluarga ada tetapi masih terbatas, sehingga diperlukan peran sekolah dan pemerintah dalam memberikan pelatihan literasi digital yang inklusif. Dengan adanya pelatihan tersebut, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara setara dalam pendidikan.

4. Menilai Akses Pengguna Digitalisasi Sosial

Penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi kuat dalam memanfaatkan teknologi, tetapi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses aplikasi, perangkat, dan jaringan internet. Dukungan keluarga berperan, meski terbatas oleh kondisi ekonomi. Karena itu, intervensi pemerintah melalui penyediaan pelatihan dan perangkat digital yang lebih luas sangat diperlukan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata, inklusif, dan berkeadilan.

B. Saran

1. Bagi penyandang disabilitas fisik, diharapkan terus meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan digital agar dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan serta kemandirian hidup.

2. Bagi keluarga, perlu memberikan dukungan yang konsisten, baik berupa fasilitas, bimbingan, maupun dorongan emosional sehingga penyandang disabilitas merasa percaya diri dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bagi sekolah dan lembaga pendidikan, disarankan untuk menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dengan mengintegrasikan literasi digital serta memfasilitasi pelatihan yang menunjang kebutuhan khusus siswa disabilitas.
4. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan memperluas program digitalisasi inklusif, termasuk penyediaan perangkat ramah disabilitas dan jaringan internet yang memadai, agar tercipta pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang berpengaruh serta memperluas subjek penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, M. (2016). *Analisis Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Agustina. (2021). Penelaahan penggunaan teknologi asistif dan peningkatan kemandirian penyandang disabilitas fisik. *Social Work Journal*, 14(2), 135–147.
- Alisjahbana, A., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Anshar, Muh. Nadjib M., & Supratomo. (2017). *Tingkat Aksesibilitas dan Pemanfaatan Media Baru Dalam Proses Pembelajaran dan Interaksi Sosial*. Jurnal Komunikasi KAREBA.
- Aprizal, R., & Samin, M. (2021). *Evaluasi Fasilitas Transportasi Umum Ramah Disabilitas di Kota Makassar*. Makassar: Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- Arnyanto, D., Najich, A. B., Oktavia, S. N. N., Ambarwati, I., Yunitasari, L., & Setianingrum, N. (2024). Membangun strategi inklusif dalam pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan di tengah keberagaman. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10), 125–129.
- Caroline & Aslan. (2025). *Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Melalui Teknologi: Tantangan dan Solusi di Negara Berkembang*. Jurnal Ilmiah Edukatif.
- Dina Zahrotun Ni mah, Evi Chamalah, & Aida Azizah. (2021). *Fleksibilitas dan Aksesibilitas Digitalisasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Semantika.
- Farrisqi, K. A., & Pribadi, F. (2022). Perlindungan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 149–155.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusif sosial dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 10(1), 74–84.
- Hadiyanto, Rifki Aulia Batubara, & Iman Kasiman Navireja. (2024). *Hubungan Karakteristik Individu dan Aksesibilitas terhadap Internet dengan Tingkat Literasi Digital di Kalangan Pemuda*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.
- Handayani, R., Suryani, N., & Rahayu, S. (2023). Strategi pembelajaran inklusif dalam meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(4), 31896–31903.
- Hendrawati. (2017). *Studi Kesiapan Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Makassar*. Makassar: Balitbangda.
- International Telecommunication Union. (2022). *Digital Inclusion*. Geneva: ITU.

- Judijanto, A., Setiawan, M., & Wulandari, R. (2025). Strategi inklusi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 15–28.
- Kota, A., Dinas Ketenagakerjaan, & ULD. (2023). *Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas Kota Makassar*. Makassar: ULD.
- Kurniasih, R. I., & Saefullah, R. S. (2021). Inklusi sosial sebagai transformasi layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 7(2), 149–160. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>
- Layanan, A., & Disabilitas, P. (2022). *Evaluasi Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Makassar*. Makassar: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
- Makassar. (2023). *Makassar Raih Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas*.
- Muhibbin, M. (2021). Tantangan pengembangan pendidikan tinggi inklusi di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Pendidikan*, 8(2), 45–55.
- Mulyani, E., & Abidinayah, M. (2021). Strategi guru dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 6(1), 35–44.
- Murwaningsih, S., & Wedjajati, S. (2021). Penguatan desa inklusif untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Kulon Progo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 30–46.
- Muthia, D., & Fauziah, S. (2024). Penerapan inklusi sosial di perpustakaan daerah untuk mendukung akses difabel. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 9(1), 15–28.
- Muthia, R., & Fauziah, N. (2024). *Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Layanan Perpustakaan Umum*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasihudin, A. (2023). Evaluasi program literasi digital disabilitas fisik di Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. *Sosmaniora: Journal Literasi dan Pemberdayaan*, (November 2023).
- Nur Azizah, Muhammad Daffa Firiza, Po Abas Sunarya, & Nur Silawati. (2025). *Analisis Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh: Dampak Aksesibilitas dan Efektivitas Pendidikan*. Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi
- Oxford University Press. (2024). *Inclusion*. In *Oxford Learner's Dictionaries*.
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). *Jalan Panjang Menuju Inklusif Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.

- Ridlwan, M. (2013). Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 231–250.
- Sihombing, R., & Sihombing, T. (2024). Implementasi kebijakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan Sosial*, 8(1), 45–59.
- Suarise Indonesia. (2024). *Aplikasi Inklusif Sosial: Menyatukan Teknologi dan Kemanusiaan bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Suarise Foundation.
- Sulsel, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Data Statistik Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2023–2024*. Makassar: Bappelitbangda.
- Surullah. (2020). *Peran Guru Dalam Pembelajaran Bagi Siswa Penyandang Disabilitas*. [PDF file].
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The Digital Divide*. Cambridge: Polity Press.
- Violetta, C. A., & Susetyo, H. (2023). Hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1909–1922.
- Wisesa, I. M. N. N., & Valentina, T. D. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi pada penyandang disabilitas fisik: Literature review. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2559–2564.

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central golden star with multiple points. Surrounding the star is a circular border containing the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' at the top and 'UPD PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN' at the bottom. The entire logo is rendered in a light blue and purple color scheme.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Staff Dinas Sosial



Wawancara Bersama Orang Tua dan Murid Penyandang Disabilitas



Komunitas atau Organisasi Pendukung Berbasis Digital



Beberapa Platform media sosial dan komunitas di Makassar yang mendukung pendidikan bagi penandang disabilitas







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman No. 3, Makassar 90132 Telp. (0411) 840000 Fax. (0411) 840006
Website : <http://dpmptsp.sulawesi.go.id> Email : info@dpmptsp.sulawesi.go.id
Makassar 90001

Nomor : 1786/SL/PTSP/2025
Lampiran :
Perihal : Notifikasi

Kepada Yth.
Wakil Walikota

Tempat

Sehubungan surat Ketua UPTD UPTDRI Makassar Nomor : 003/PTSP/2025-4/visi/visi/2025
tanggal 20 Agustus 2025 perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan :

N a m a
Nama Pribadi : **AYUWATI SEPTANA**
Nama Perusahaan : **PTSP**
Program Studi : **Manajemen Informatika**
Pemerintah/Instansi : **PTSP**
Alamat : **Jl. Dr. Arudjuna No. 1, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Berikutnya untuk melakukan penelitian di lingkungan instansi dalam rangka menyusun SKHPSI
dengan judul :

" STRATEGI PEMERINTAH MELALUI DIGITALISASI INKLUSI SOSIAL PENYANGKUT
DISABILITAS PEMK KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Agustus s.d 28 Oktober 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan kami mengundang kegiatan tersebut
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat lain perkenan.

Dengan Surat Keputusan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dijelaskan di Makassar
Pada Tanggal 20 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan



ASRIY, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMERINTA UTAMA MUDA (IV/II)
Np : 18750021 200312 1 008

Terlampir :
1. Surat Keputusan Walikota Makassar di Makassar
2. Perijinan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGKUALIFIKASIAN, DAN PENGKUALIFIKASIAN KEPADA MAHASISWA

Jl. Sultan Hassanudin No. 101, 90111 Makassar, Sulawesi Selatan



(Signature)

Nama : ASLE PIRAHATI AYU MUBINAH
 NPM : 20041121018
 Prodi : Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat

Kepada Yth:
 Kepala Universitas Islam Indonesia
 C/pt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & PEP Provinsi Sulawesi Selatan

di:
 Makassar

Perihal: Surat No. 35

Menerangkan soal Ujian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nomor 2014 tanggal 19 Agustus 2021, untuk pengisian nilai dan nilai ujian dan nilai ujian.

Nama : AYU MUBINAH
 NPM : 20041121018
 Prodi : Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat
 Prodi : Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan.

"Dengan Penerimaan Melalui Sistem Informasi dan Rapor Penerimaan Pendidikan
 Pendidikan Muhammadiyah"

Tanggal diteruskan dan tanggal 19 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021.

Selamat dan semoga sukses di masa depan. Makassar, tanggal 19 Agustus 2021.

Demikian, dan terima kasih atas kerjasamanya dan kerjasamanya dalam hal ini.

Wassalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 Agustus 2021.

Makassar, 19 Agustus 2021.

Roma, 19 Agustus 2021.



Dr. Wahid Arifin, M.Pd.
 NPM. 1121018



Jl. Sultan Hassanudin No. 101, 90111 Makassar, Sulawesi Selatan
 Email: info@umh.ac.id, info@umh.ac.id, info@umh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Ayuwarni Septania. Lahir di Makassar pada tanggal 08 Mei 1993. Anak Pertama dari pasangan Ayahanda Aswan Azis dan Ibu Riny Anggreni H. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di SD Negeri Sudirman Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 21 Makassar dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi tahun 2011 di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2025 dengan menyusun Skripsi berjudul "Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar".

STRATEGI PEMERINTAH MELALUI DIGITALISASI INKLUSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK KOTA MAKASSAR

Ayuwarni Septania¹, Nurbiah Tahir², Iswadi Amiruddin³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: ayuwarniseptania@gmail.com

Abstract : *This study aims to examine the Government's Strategy through Inclusive Social Digitalization for Persons with Physical Disabilities in Makassar City. This research employs a descriptive qualitative method. The study uses the theory of Poerwati et al. (2024), which applies the following indicators: (1) Access to Motivation, (2) Access to Material, (3) Access to Skills, and (4) Access to Use. The findings indicate that the learning motivation of persons with physical disabilities grows through the synergy of education, family support, and government-led digital literacy training. Technology provides skills and confidence, families offer emotional support, while the government creates inclusive access that fosters independence. Nevertheless, limitations such as the lack of devices, internet connectivity, and basic digital skills remain major challenges. Family support plays a role, albeit limited, thus requiring concrete interventions from the government and schools through the provision of disability-friendly devices and inclusive digital literacy training. With collaboration among individual motivation, family support, and government policies, persons with physical disabilities have the opportunity to gain more equal, widespread, and just access to digital education.*

Keywords: *Strategy, Government, Digital, Inclusive, Social*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori (Poerwati, dkk, 2024) yang dimana menggunakan indikator, (1) Akses Motivasi, (2) Akses Material, (3) Akses Keterampilan, (4) Akses Penggunaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa motivasi belajar penyandang disabilitas fisik tumbuh dari sinergi pendidikan, dukungan keluarga, serta pelatihan literasi digital pemerintah. Teknologi memberikan keterampilan dan kepercayaan diri, keluarga memberikan dukungan emosional, sementara pemerintah membuka ruang akses inklusif yang mendorong kemandirian. Meskipun demikian, keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta keterampilan digital dasar masih menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga berperan meski terbatas, sehingga diperlukan intervensi nyata dari pemerintah dan sekolah melalui penyediaan perangkat ramah disabilitas serta pelatihan literasi digital yang inklusif. Dengan adanya kolaborasi antara motivasi individu, dukungan

keluarga, dan kebijakan pemerintah, penyandang disabilitas fisik berpeluang memperoleh akses pendidikan digital yang lebih setara, merata, dan berkeadilan

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah, Digital, Inklusif, Sosial

1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses informasi. Namun, kelompok ini masih sering menghadapi hambatan baik dari segi infrastruktur, sosial, maupun aksesibilitas teknologi. Di Kota Makassar, penyandang disabilitas fisik masih banyak mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan publik secara langsung karena kondisi mobilitas, minimnya sarana prasarana yang ramah difabel, serta masih adanya stigma sosial.

Menurut definisi World Health Organization (WHO), disabilitas merupakan keterbatasan atau berkurangnya fungsi organ yang berdampak pada kemampuan fisik maupun mental seseorang dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini menyebabkan individu tidak dapat menjalankan aktivitas sesuai aturan atau standar normal, dan umumnya dipahami dalam tingkat individu. (Afin Murtie, Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta : Maxima, 2016), h. 88.) Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa disabilitas adalah kondisi seseorang yang memiliki perbedaan kemampuan dibandingkan dengan individu pada umumnya, sehingga menimbulkan keterbatasan fisik maupun mental. Selain itu, adanya hambatan sosial juga turut memengaruhi sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup sejahtera, memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan publik, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus agar dapat memiliki kesempatan dan manfaat yang setara dalam mewujudkan persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. (Ridwan, 2013).

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin dikuatkan dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengadopsi prinsip-prinsip Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konvensi Internasional ini menekankan delapan prinsip utama, di antaranya penghormatan terhadap martabat yang melekat (inherent dignity), non-diskriminasi, partisipasi penuh dalam masyarakat, kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas (Violetta & Susetyo, 2023).

Dengan prinsip ini, penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Disabilitas fisik, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, dapat disebabkan oleh faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Menurut Agustina (2021), penyebab disabilitas fisik dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar: pra-lahir,

seperti gangguan genetik dan kekurangan nutrisi selama kehamilan; saat lahir, yang melibatkan komplikasi dalam proses persalinan; dan pasca-lahir, seperti kecelakaan, infeksi, atau trauma. Dalam konteks disabilitas digital, keterbatasan fisik yang berasal dari tahapan ini menjadi penghalang utama untuk mengakses teknologi secara merata, terutama ketika tidak ada intervensi medis atau rehabilitasi yang memadai.

Sementara itu, dari sisi sosial dan lingkungan, Surullah (2020) menyoroti bahwa kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan khusus, serta minimnya kesadaran orang tua terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus merupakan faktor-faktor yang turut memperburuk kondisi disabilitas fisik menjadi disabilitas digital. Anak-anak dengan disabilitas yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan fasilitas teknologi adaptif seperti perangkat lunak pendukung atau alat bantu komunikasi, sehingga mereka terisolasi dari ekosistem digital sejak dini.

Dalam studi literatur yang dilakukan oleh I Made Narendra Nanta Wisesa dan Tience Debora Valentina (2024), disimpulkan bahwa resiliensi penyandang disabilitas fisik sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi regulasi emosi, self-efficacy, kemampuan coping, dan fleksibilitas kognitif, sedangkan faktor eksternal terdiri dari dukungan orang tua dan teman sebaya. Kurangnya dukungan ini membuat penyandang disabilitas fisik lebih rentan terhadap penarikan diri, depresi, dan hilangnya motivasi untuk beradaptasi dengan lingkungan digital. Ketika resiliensi rendah, akses dan penggunaan teknologi digital juga menjadi sangat terbatas.

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi

menjadi sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan. Di negara berkembang, teknologi digital menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi berbagai hambatan seperti kurangnya tenaga pengajar, keterbatasan sarana pendidikan, dan jarak geografis yang menyulitkan pemerataan pendidikan. Caroline dan Aslan (2025) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas, bahkan bagi siswa di daerah terpencil. Mereka menekankan bahwa teknologi dapat menyediakan materi pendidikan berkualitas tinggi secara setara tanpa memandang lokasi.

Namun demikian, manfaat teknologi tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan secara merata. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor utama penghambat aksesibilitas. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Dina Zahrotun Ni'mah, Evi Chamalah, dan Alda Azizah (2021), yang menyatakan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran—seperti kemudahan belajar di mana saja dan kapan saja—fakta di lapangan menunjukkan masih banyak siswa yang tidak memiliki perangkat memadai atau koneksi internet yang stabil. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.

Kesenjangan digital juga tampak nyata antara pelajar di perkotaan dan pedesaan. Anshar, Muh. Nadjib M., dan Supratomo (2017) dalam studi mereka menunjukkan bahwa pelajar di kota memiliki akses dan pemanfaatan media baru yang lebih tinggi dibandingkan pelajar di desa. Perbedaan ini bukan hanya terkait fasilitas, tetapi juga menyangkut motivasi, keterampilan, dan dukungan

lingkungan. Media baru seperti internet dan aplikasi digital lebih umum digunakan oleh pelajar kota dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial, sementara pelajar di desa masih tertinggal karena hambatan akses dan keterbatasan sumber daya.

Studi lain oleh Hadiyanto, Rifki Aulia Batubara, dan Iman Kasiman Nawireja (2024) meneliti aksesibilitas internet dan dampaknya terhadap literasi digital di kalangan pemuda desa. Mereka menemukan bahwa kepemilikan perangkat digital, biaya internet, dan frekuensi penggunaan internet memiliki korelasi signifikan terhadap keterampilan digital pemuda. Namun menariknya, meskipun penggunaan internet tinggi, belum tentu dibarengi dengan pemahaman etika dalam bermedia digital. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi etika dan budaya digital.

Dikutip dari (Poerwanti, *dkk*, 2024) Inklusi digital, menurut Sanders (2020), didefinisikan sebagai keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menemukan solusi terkait peluang, akses, pengetahuan, dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, khususnya internet.

Jan van Dijk (2020) menyatakan bahwa inklusi digital dapat tercapai apabila masyarakat memiliki akses motivasi, akses material, akses keterampilan, dan akses penggunaan, sebab keempat dimensi ini merupakan syarat utama seseorang dapat memanfaatkan teknologi digital secara penuh. Sedangkan ITU (2022) menegaskan bahwa inklusi digital merupakan prinsip menyediakan akses setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan, dengan tujuan mewujudkan konektivitas universal dan akses digital yang bermakna.

Beberapa istilah yang memiliki makna serupa dengan inklusi digital antara lain kapabilitas digital, partisipasi digital, dan literasi digital. Semua istilah ini pada dasarnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup serta membantu mereka mengatasi berbagai keterbatasan yang dimiliki. (The Wales Co-operative Center with Carnegie UK Trust, 2018).

Aspek kunci dalam mewujudkan inklusi digital menurut Dijk (2005) terdiri dari (a) akses motivasi, Merupakan tahap awal dimana individu memiliki dorongan atau keinginan untuk menggunakan teknologi digital. Banyak orang yang enggan menggunakan teknologi karena merasa tidak perlu, takut salah, atau menganggap terlalu rumit. Oleh karena itu, membangun motivasi sangat penting agar penyandang disabilitas maupun masyarakat umum terdorong untuk mencoba memanfaatkan layanan digital. (b) akses material, Berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses teknologi. Misalnya, ketersediaan perangkat (smartphone, komputer), jaringan internet yang memadai, serta infrastruktur pendukung seperti pusat layanan berbasis digital. Bagi penyandang disabilitas, akses material juga mencakup perangkat adaptif seperti *screen reader*, keyboard khusus, atau aplikasi pendukung yang membuat teknologi lebih mudah digunakan. (c) akses keterampilan, Mengacu pada kemampuan individu dalam mengoperasikan teknologi digital secara efektif. Ini mencakup keterampilan dasar (misalnya cara menggunakan smartphone, aplikasi, atau internet) hingga keterampilan tingkat lanjut (seperti memahami keamanan digital, mencari informasi, atau memanfaatkan platform pelatihan daring).

Pendidikan digital dan pelatihan khusus menjadi penting agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan kompetensi ini. (d) akses penggunaan, Tahap di mana teknologi digital benar-benar dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekadar memiliki perangkat dan keterampilan, tetapi juga bagaimana individu memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan nyata: mencari informasi, bekerja, berinteraksi sosial, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun layanan publik. Pada level ini, digitalisasi inklusif harus memastikan bahwa penggunaan teknologi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup, termasuk bagi penyandang disabilitas

Akses motivasi pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap penyandang disabilitas terhadap teknologi. Sementara itu, akses material menunjukkan ketersediaan peluang dan sarana untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, akses keterampilan mencerminkan kemampuan yang diperoleh untuk menggunakan teknologi secara efisien dan efektif. Terakhir, terdapat akses terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri, yang menjadi tahap akhir dalam memastikan teknologi dapat digunakan dengan optimal.

Secara umum, strategi merupakan serangkaian rencana atau langkah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, pendidikan, dan pemberdayaan sosial, strategi berfungsi sebagai panduan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif, menghadapi tantangan, dan memastikan pencapaian sasaran yang diinginkan. Strategi inklusif, misalnya, berorientasi pada penghapusan hambatan partisipasi

dan menciptakan keterlibatan yang setara bagi semua pihak, khususnya kelompok yang selama ini terpinggirkan (Judijanto, 2025)

Dalam dunia pendidikan, strategi inklusif menjadi salah satu pendekatan kunci untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan memastikan semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki kesempatan belajar yang setara. Strategi ini mencakup adaptasi kurikulum, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. (Rona Handayani dkk, 2023) menekankan bahwa strategi pembelajaran inklusif harus mengedepankan kolaborasi antar siswa, modifikasi perangkat ajar, dan dukungan tambahan agar perkembangan akademik dan sosial anak inklusif dapat terfasilitasi dengan baik.

Selain dalam konteks sekolah dasar hingga menengah, strategi inklusif juga relevan di perguruan tinggi. Penelitian Muhibbin (2021) menemukan bahwa pengembangan strategi inklusi di kampus menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur ramah difabel, paradigma diskriminatif, dan kurangnya kompetensi dosen dalam menangani mahasiswa disabilitas. Untuk mengatasinya, strategi yang direkomendasikan mencakup penguatan regulasi, penyediaan fasilitas aksesibilitas, pendampingan mahasiswa difabel, dan pengembangan model pembelajaran adaptif (Muhibbin, 2021). Strategi semacam ini mendorong kampus menjadi lingkungan belajar yang adil dan kolaboratif bagi semua mahasiswa.

Murwaningsih & Wedjajati (2021) menemukan bahwa inklusi sosial yang diterapkan di tingkat komunitas, seperti desa inklusif di Kulon Progo, mampu menciptakan lingkungan sosial yang ramah difabel. Desa ini membentuk Forum Disabilitas untuk memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menyediakan fasilitas publik ramah difabel dan program pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan lokal. Praktik ini menegaskan bahwa inklusi sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus berbentuk tindakan nyata yang mengubah struktur sosial agar lebih adil dan partisipatif.

Perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Pengembangan aplikasi yang dirancang khusus dapat membantu mereka mengakses informasi, layanan, dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Aplikasi semacam itu dapat mencakup fitur-fitur seperti navigasi aksesibilitas, platform pelatihan online, dan jaringan sosial yang mendukung. Di Makassar, inisiatif untuk mengembangkan aplikasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik dapat memperkuat upaya pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah dan aksesibel, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas. Kerja sama ini menjadi kunci untuk memastikan setiap solusi yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas. teknologi yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. (Layanan & Disabilitas, 2022)

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar juga

mengembangkan program pendidikan berbasis digital dalam kerangka digitalisasi inklusi sosial bertujuan menyediakan akses pembelajaran yang setara dan ramah bagi penyandang disabilitas. Program ini berfokus pada peningkatan literasi digital dasar, penguatan keterampilan akademik maupun vokasional, serta dukungan kemandirian melalui pemanfaatan teknologi. Upaya yang dilakukan meliputi pendidikan non-formal berbasis digital dengan modul kejar paket A-C yang dilengkapi media aksesibel seperti video bersubtitle, audio book, dan braille digital. Untuk mendukungnya, dikembangkan pula platform daring "Makassar Belajar Inklusif" yang dapat diakses dengan berbagai perangkat melalui fitur aksesibilitas.

Selain pendidikan akademik, Dinas Sosial juga memberikan pelatihan vokasional digital, seperti mengetik dengan screen reader, pembuatan konten audio atau podcast, dan desain grafis sederhana untuk membuka peluang kerja maupun wirausaha. Layanan diperluas melalui pusat pembelajaran inklusif digital di tingkat kota dan kelurahan, serta unit belajar keliling bagi wilayah yang terbatas akses. Program ini turut melibatkan keluarga dan pendamping dengan pelatihan literasi digital dan parenting inklusif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan setara dalam pendidikan digital sekaligus lebih siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan dunia kerja.

Dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis digital bagi penyandang disabilitas, pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Makassar menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur, di mana tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil serta ketersediaan perangkat teknologi bantu yang masih terbatas dan mahal. Di samping itu,

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi hambatan karena belum sepenuhnya tenaga pendidik maupun aparaturnya memahami metode pembelajaran inklusif dan pemanfaatan teknologi aksesibel. Hambatan lain muncul dari koordinasi lintas sektor, mengingat program ini membutuhkan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Diskominfo, Disnaker, serta organisasi penyandang disabilitas, yang sering kali memerlukan waktu panjang dalam penyelarasan kebijakan. Dari sisi pendanaan, anggaran yang tersedia di APBD masih terbatas sehingga menyulitkan penyediaan alat bantu maupun pengembangan platform pembelajaran digital. Tidak kalah penting, masih adanya stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas juga menjadi faktor penghambat implementasi program.

Sementara itu, penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat juga menghadapi tantangan tersendiri. Akses terhadap teknologi masih menjadi persoalan utama, karena tidak semua penyandang disabilitas memiliki gawai atau komputer pribadi, bahkan biaya Internet. Hal ini juga sering menjadi hambatan bagi individu yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dari segi keterampilan, sebagian peserta masih minim pengetahuan dasar mengenai penggunaan aplikasi digital sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Hambatan fisik dan sensorik juga turut memengaruhi, misalnya penyandang tunanetra yang membutuhkan screen reader atau penyandang tuli yang membutuhkan layanan penerjemah bahasa isyarat, yang jika tidak tersedia akan menghambat proses belajar. Selain itu, banyak penyandang disabilitas masih bergantung pada peran pendamping atau keluarga, sehingga apabila pendamping tidak terlatih, proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Faktor psikologis seperti

rasa minder, rendah diri, serta stigma dari lingkungan sekitar juga membuat sebagian penyandang disabilitas kurang percaya diri untuk aktif berpartisipasi dalam pendidikan berbasis digital.

Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan di Makassar perlu untuk bekerja sama dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi teknologi yang mendukung inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, sehingga tercipta kota yang benar-benar ramah bagi semua warganya. Berdasarkan penjelasan melalui latar belakang maka uraian permasalahan diatas penulis tertarik meneliti tentang **"Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar"**.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan berbagai dokumentasi (dokumen resmi) Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar. Tipe penelitian tipe deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada bagaimana Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi potret nyata situasi Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar tersebut, yang berguna

sebagai bahan evaluasi maupun referensi bagi pihak terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar berdasarkan teori 4 indikator yang dikemukakan oleh Inklusi Digital Poerwanti, dkk, 2024) yaitu : Akses Motivasi, Akses Material, Akses Keterampilan, Akses Penggunaan.

Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Transformasi pendidikan di era digital membawa peluang baru bagi penyandang disabilitas fisik untuk mengembangkan potensi diri. Semangat belajar mereka didorong oleh motivasi yang bersumber dari dua hal, yaitu keinginan pribadi untuk mandiri dan berkembang, serta dukungan lingkungan sekitar. Dari sisi personal, penyandang disabilitas menunjukkan tekad yang kuat untuk memperoleh ilmu dan keterampilan meskipun terbatas secara fisik. Sedangkan dari sisi eksternal, peran keluarga, tenaga pendidik, komunitas, dan pemerintah berfungsi sebagai penopang yang menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus memberikan akses nyata pada teknologi.

Motivasi tersebut tampak dalam partisipasi aktif mereka untuk mempelajari keterampilan digital, kesiapan memanfaatkan aplikasi pendidikan daring, serta keyakinan bahwa teknologi mampu menjadi jembatan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi yang kuat, penyandang disabilitas tidak hanya sekadar ikut serta dalam pendidikan digital, tetapi juga menempatkan teknologi sebagai sarana penting menuju kesetaraan dan kemandirian.

Wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak memperlihatkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang saling mendukung. Pertama, pendidikan berbasis teknologi memberi peluang baru sekaligus membangun rasa percaya diri. Kedua, keluarga memberikan dukungan moral dan material, walaupun masih terbatas oleh faktor ekonomi. Ketiga, pemerintah melalui program literasi digital inklusif berusaha memperluas akses dan menyediakan sarana yang lebih ramah disabilitas. Ketiga aspek ini membentuk sinergi yang mampu memperkuat motivasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan teknologi digital.

Dengan demikian, motivasi dapat dipandang sebagai inti dari proses inklusi pendidikan digital. Ketika motivasi internal diperkuat oleh dukungan eksternal, penyandang disabilitas fisik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang setara, meningkatkan kemandirian, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial.

Menilai Akses Material yang Tersedia

Keadilan akses pendidikan di era digital sangat bergantung pada tersedianya material pendukung yang memadai, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik. Perangkat teknologi dan jaringan internet bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan menjadi instrumen utama agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran daring secara optimal. Tanpa dukungan material tersebut, kesenjangan pendidikan akan semakin nyata karena siswa dengan keterbatasan fisik sulit memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan siswa lainnya.

Selain itu, akses material bagi penyandang disabilitas tidak hanya mencakup perangkat umum seperti laptop atau ponsel, melainkan juga sarana khusus yang

mendukung keterbatasan mereka, seperti aplikasi ramah disabilitas, software pembaca layar, serta fasilitas belajar yang inklusif. Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus agar penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar.

Berdasarkan hasil analisis, meskipun penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran digital, keterbatasan perangkat dan jaringan masih menjadi kendala utama. Peran keluarga tetap penting melalui dukungan sederhana seperti penyediaan kuota internet atau gawai, walaupun sering kali terbatas oleh kondisi ekonomi. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan solusi yang nyata, baik berupa bantuan perangkat ramah disabilitas maupun pelatihan literasi digital. Dengan adanya kolaborasi antara semangat individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, maka pendidikan digital yang setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat terwujud.

Menganalisis Akses Keterampilan

Peningkatan keterampilan digital merupakan salah satu langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di era pendidikan modern. Kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, baik komputer, smartphone, maupun aplikasi pembelajaran daring, menjadi penentu apakah mereka dapat mengikuti proses belajar secara sejajar dengan peserta didik lainnya. Penguasaan literasi digital dasar seperti penggunaan aplikasi konferensi video, mengetik, hingga mengakses platform e-learning memberikan peluang besar bagi

penyandang disabilitas untuk lebih mudah memahami materi pelajaran sekaligus memperluas ruang belajar mereka.

Meski demikian, hambatan yang sering muncul adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan khusus yang relevan dengan kebutuhan mereka. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam menguasai keterampilan digital karena minimnya bimbingan terarah. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah menjadi sangat krusial dalam menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui dukungan tersebut, penyandang disabilitas fisik dapat lebih percaya diri, aktif berpartisipasi, dan memiliki kesempatan yang lebih setara dalam pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa meskipun siswa penyandang disabilitas memiliki semangat tinggi untuk belajar menggunakan teknologi, keterbatasan keterampilan digital dasar masih menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga memberi peran penting dalam mendampingi, namun sering kali terbatas oleh kurangnya pengetahuan teknologi. Karena itu, intervensi sekolah dan pemerintah dalam bentuk pelatihan literasi digital menjadi sangat dibutuhkan. Dengan adanya program literasi digital inklusif, penyandang disabilitas tidak hanya mampu menguasai teknologi, tetapi juga dapat belajar mandiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan bersaing secara setara dengan siswa lain.

Menilai Akses Penggunaan Digitalisasi Sosial

Digitalisasi sosial pada dasarnya bertujuan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi setiap individu agar dapat berpartisipasi aktif dalam pendidikan maupun

kehidupan sosial, termasuk bagi penyandang disabilitas fisik. Menilai akses penggunaannya berarti melihat apakah teknologi yang disediakan—baik berupa perangkat, jaringan internet, maupun aplikasi pembelajaran—benar-benar dapat digunakan secara mudah, adil, dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya menjadi inovasi, tetapi juga sarana nyata untuk mendorong kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun penyandang disabilitas fisik memiliki antusiasme tinggi untuk belajar melalui teknologi, mereka masih menghadapi kendala pada keterbatasan aplikasi yang ramah disabilitas dan kualitas jaringan internet. Keluarga tetap memberikan dukungan semampunya, namun kondisi ekonomi yang terbatas membuat peran mereka belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan hadir melalui program pelatihan digital dan penyediaan perangkat yang lebih inklusif. Dengan langkah tersebut, manfaat digitalisasi sosial dapat dirasakan secara adil, merata, dan benar-benar mendukung terciptanya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas.

4. Kesimpulan

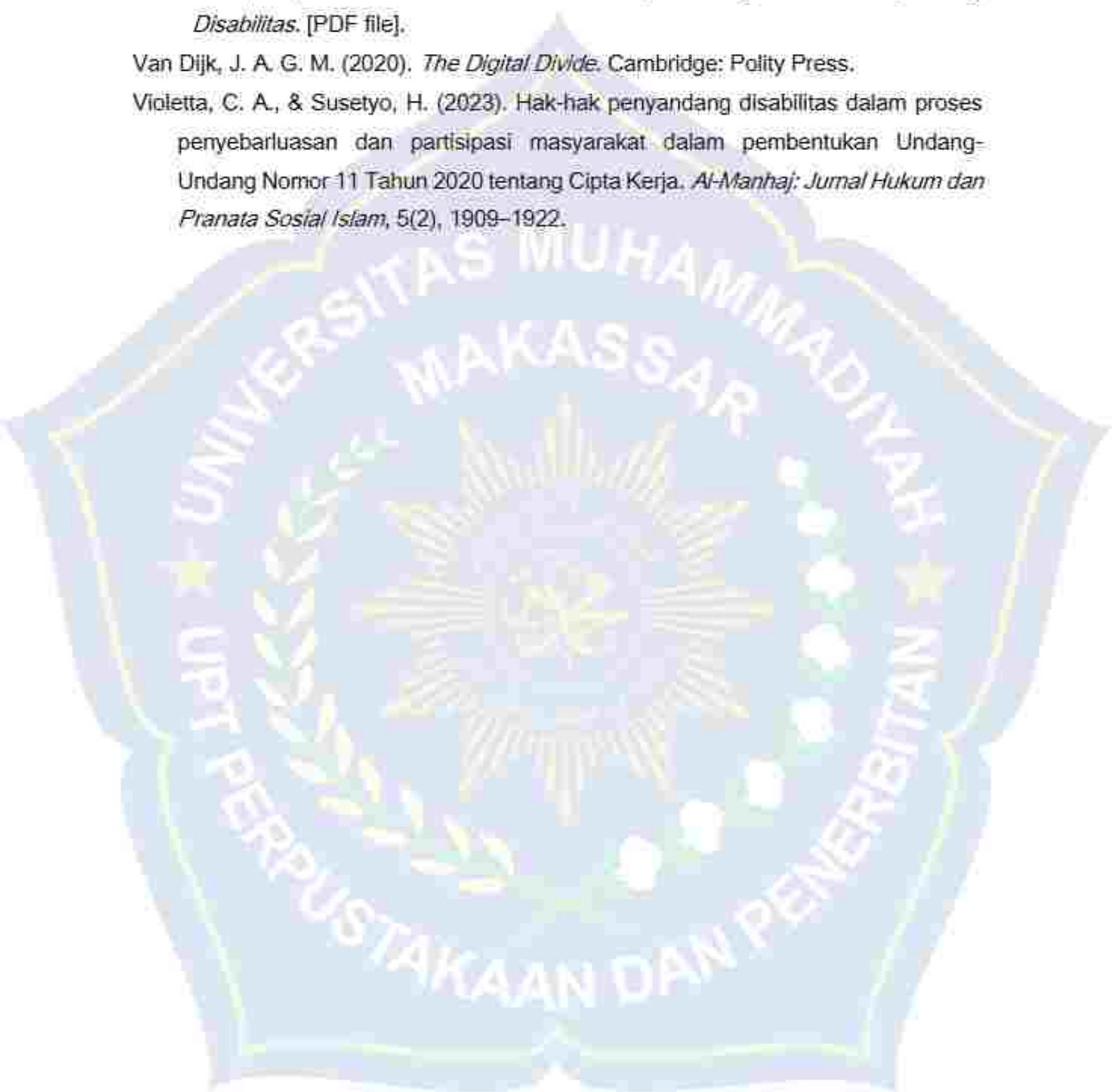
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi, Motivasi belajar penyandang disabilitas fisik tumbuh melalui sinergi pendidikan, dukungan keluarga, dan pelatihan literasi digital pemerintah. Teknologi memberi keterampilan dan rasa percaya diri, keluarga memberikan dorongan emosional, sedangkan pemerintah membuka akses inklusif. Kombinasi

ketiganya memungkinkan penyandang disabilitas mengatasi keterbatasan, memperoleh pendidikan setara, dan meningkatkan kemandirian. (2) Menilai Akses Material yang Tersedia, Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran digital, namun masih terkendala perangkat dan jaringan Internet. Dukungan keluarga tetap membantu meski terbatas, sedangkan pemerintah perlu hadir dengan solusi nyata melalui penyediaan fasilitas digital ramah disabilitas dan program pelatihan. Dengan kolaborasi antara motivasi individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, tercipta peluang pendidikan yang lebih inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas fisik. (3) Menganalisis Akses Material Yang Tersedia, Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar, namun keterbatasan keterampilan digital dasar menjadi kendala utama. Dukungan keluarga ada tetapi masih terbatas, sehingga diperlukan peran sekolah dan pemerintah dalam memberikan pelatihan literasi digital yang inklusif. Dengan adanya pelatihan tersebut, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan, belajar mandiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara setara dalam pendidikan. (4) Menilai Akses Pengguna Digitalisasi Sosial, Penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi kuat dalam memanfaatkan teknologi, tetapi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses aplikasi, perangkat, dan jaringan internet. Dukungan keluarga berperan, meski terbatas oleh kondisi ekonomi. Karena itu, intervensi pemerintah melalui penyediaan pelatihan dan perangkat digital yang lebih luas sangat diperlukan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata, inklusif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Agustina. (2021). Penelaahan penggunaan teknologi asistif dan peningkatan kemandirian penyandang disabilitas fisik. *Social Work Journal*, 14(2), 135–147.
- Anshar, Muh. Nadjib M., & Supratomo. (2017). *Tingkat Aksesibilitas dan Pemanfaatan Media Baru Dalam Proses Pembelajaran dan Interaksi Sosial*. Jurnal Komunikasi KAREBA
- Caroline & Aslan. (2025). *Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Melalui Teknologi: Tantangan dan Solusi di Negara Berkembang*. Jurnal Ilmiah Edukatif
- Dina Zahrotun Nîmah, Evi Chamalah, & Aida Azizah. (2021). *Fleksibilitas dan Aksesibilitas Digitalisasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Semantika
- Hadiyanto, Rifki Aulia Batubara, & Iman Kasiman Nawireja. (2024). *Hubungan Karakteristik Individu dan Aksesibilitas terhadap Internet dengan Tingkat Literasi Digital di Kalangan Pemuda*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
- International Telecommunication Union. (2022). *Digital Inclusion*. Geneva: ITU.
- Judijanto, A., Setiawan, M., & Wulandari, R. (2025). Strategi inklusi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 15–28.
- Layanan, A., & Disabilitas, P. (2022). *Evaluasi Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Makassar*. Makassar: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
- Muhibbin, M. (2021). Tantangan pengembangan pendidikan tinggi inklusi di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Pendidikan*, 8(2), 45–55.
- Mulyani, E., & Abidinsyah, M. (2021). Strategi guru dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 6(1), 35–44.
- Murwaningsih, S., & Wedjajati, S. (2021). Penguatan desa inklusif untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Kulon Progo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 30–46.
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). *Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.
- Ridlwan, M. (2013). Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 231–250

- Surullah. (2020). *Peran Guru Dalam Pembelajaran Bagi Siswa Penyandang Disabilitas*. [PDF file].
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The Digital Divide*. Cambridge: Polity Press.
- Violetta, C. A., & Susetyo, H. (2023). Hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1909–1922.



The background of the page features a large, faint watermark of the logo of Universitas Muhammadiyah UPT Peringkat 1. The logo is a shield-shaped emblem with a blue border. Inside the shield, there is a central sunburst or star-like symbol with multiple points. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in a semi-circle at the top, and "UPT PERINGKAT 1" is written in a semi-circle at the bottom. The text "TAJAKAAN DAN PENERBITAN" is written in a semi-circle on the right side. The logo is rendered in a light blue and yellow color scheme.

Ayuwarni Septania

105611121018 BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Aug-2025 12:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2736726000

File name: BAB_I_AYUWARNI_SEPTANIA.docx (23.95K)

Word count: 1910

Character count: 13520

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses informasi. Namun, kelompok ini masih sering menghadapi hambatan baik dari segi infrastruktur, sosial, maupun aksesibilitas teknologi. Di Kota Makassar, penyandang disabilitas fisik masih banyak mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan publik secara langsung karena kendala mobilitas, minimnya sarana transportasi yang ramah disabilitas, serta masih adanya stigma sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif. Melalui digitalisasi layanan sosial, pemerintah dapat memperluas jangkauan layanan berbasis aplikasi atau website sehingga lebih mudah diakses tanpa harus datang langsung ke kantor. Inovasi ini sangat penting untuk penyandang disabilitas fisik yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan adanya fitur aksesibilitas, misalnya teks suara, subtitle, bahasa isyarat digital, maupun desain rumah digital, maka digitalisasi dapat benar-benar menghadirkan keadilan layanan.

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 Pasal 1, penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap individu yang memiliki kelainan mental dan/atau fisik yang dapat

menjadi hambatan **menyebabkan** dalam melakukan aktivitas secara wajar. Kategori tersebut mencakup **penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental,** serta gabungan keduanya. Menurut **WHO**, International Classification of Functioning, Health, and Disability (ICF) yang dikutip oleh Mutmainnah (2023) mendefinisikan **disabilitas** sebagai konsep yang terdiri atas dua aspek utama, yaitu: (1) **struktur dan fungsi tubuh individu**, serta (2) **ketidakhadiran dalam melakukan aktivitas sehari-hari** maupun dalam memperoleh **akses dan partisipasi**.

Disabilitas merupakan yang terbentuk dari kondisi tersebut sering kali menilai bahwa ketidakhadiran maupun penyandang disabilitas sulit bernomor dan berkreasi seperti orang lain, sehingga kesempatan kerja bagi mereka menjadi lebih sempit. Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar, maka keberadaan dan hak-hak mereka perlu mendapat perhatian yang serius.

Menurut data Kementerian Kewilayatan Sosial, pada tahun 2024 Estimasi **total** penyandang disabilitas berkisar antara 4,3 juta (lingkat angkat berat) hingga 22,97 juta (seluruh kategori disabilitas). Perlu diperhatikan bahwa data resmi administrasi masih jauh di bawah angka sebenarnya (<800 ribu), menunjukkan kebutuhan validasi data **menyolok**. Menurut data **Thrive Sosial Kota Makassar**, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.176 jiwa penyandang disabilitas. Sebagian besar dari mereka masih bergantung pada pekerjaan yang kurang layak, seperti pengemis, eksekusi atau penyandang tuna netra yang

mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima. Kondisi tersebut tidak hanya menambah beban permasalahan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan serius yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu sendiri.

Kota Makassar termasuk dalam jajaran kota besar yang ada di Indonesia yang telah mendukung transformasi digital melalui program Smart City. Namun, agar digitalisasi tidak menimbulkan kesenjangan baru, pemerintah perlu memastikan bahwa layanan digital benar-benar inklusif, yaitu bisa dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas yang menekankan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi penuh, dan nilai sosial.

Namun, tantangan dalam implementasi strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif saat ini bagi penyandang disabilitas fisik masih ada, termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam merancang layanan yang aksesibel, serta hambatan fisik dan teknologi yang menghambat aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan inklusi sosial yang berkualitas bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sering dihadapkan pada beragam tantangan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas umum, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Di Kota Makassar, ini menjadi perhatian penting mengingat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan.

Data dari Bappelitbangdi Sulawesi Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa Makassar memiliki 30.373 penyandang disabilitas, yang merupakan 12,296% dari total populasi kota. (Sulsel, 2024)

Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pada November 2023, Makassar menerima Amgorth Prakarya Inklusif dari Komisi Nasional Disabilitas atas upaya dalam menghormati serta menjaga hak-hak disabilitas. Penghargaan ini mencerminkan visi kota untuk menjadi "Sustainable and Smart City" yang inklusif bagi semua warganya. (Makassar, 2023) Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa akses transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Makassar masih jauh dari optimal. Sebagai contoh, layanan Bus Trans Mammasana beserta halte yang tersedia belum sepenuhnya ramah disabilitas karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar. (Aprileil & Simin, 2021)

Di sektor ketenagakerjaan, terdapat 1.016 pekerja disabilitas di Makassar per tahun 2022. Pemerintah kota melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Ketenagakerjaan berupaya memastikan hak-hak ketenagakerjaan mereka terpenuhi, termasuk Memberikan dukungan melalui program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi serta akses terhadap lapangan pekerjaan. (Kota et al., 2023) Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, program "MAJU BERSAMA" diluncurkan pada Oktober 2024 oleh Setara Berdaya Group bekerja sama dengan Pelindo Regional 4 Makassar. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM penyandang

disabilitas di wilayah Makassar, dengan fokus pada digitalisasi usaha, penguatan ketungan, dan strategi pemasaran. (Sisael, 2024)

Di Makassar, inisiatif untuk mengembangkan aplikasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik dapat memperkuat upaya pemerintah dan Peran masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif dan aksesibel sangatlah penting. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas disabilitas diperlukan agar solusi teknologi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya inklusi digital bagi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pelatihan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi, serta peningkatan kesadaran di kalangan pengembang aplikasi dan masyarakat umum tentang pentingnya desain yang inklusif.

Dengan strategi yang tepat, pengembangan program aplikasi inklusif sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di Makassar. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka, Sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Individu dengan disabilitas fisik kerap berhadapan dengan beragam hambatan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas umum, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Di Kota Makassar, isu ini menjadi perhatian penting mengingat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 3.634 penyandang disabilitas di Makassar, dengan 2.110 di antaranya mengalami

disabilitas fisik. (DATA DISABILITAS BERIMASAR RAGAM DISABILITAS, 2024). Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjamin setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses setara terhadap layanan publik. (Layanan & Disabilitas, 2022)

Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada. Penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan Akses bagi penyandang disabilitas di Makassar masih belum maksimal. Contohnya, fasilitas umum dan layanan publik belum sepenuhnya inklusif karena keterbatasan sarana serta prasarana yang sesuai standar. (Hendriyani, 2017) Di sektor ketenagakerjaan, data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 1.352 penyandang disabilitas di Makassar, mayoritas bekerja di sektor informal. (Adolph, 2016) Pemerintah kota melalui berbagai program berupaya memastikan hak-hak ketenagakerjaan mereka terpenuhi. Termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kompetensi serta peluang kerja.

Perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Pengembangan aplikasi yang dirancang khusus dapat membantu mereka mengakses informasi, layanan, dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Aplikasi semacam itu dapat mencakup fitur-fitur seperti navigasi aksesibilitas, platform pelatihan online, dan jaringan sosial yang mendukung. Di Makassar, inisiatif untuk

mengembangkan aplikasi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dapat memperkuat upaya pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah dan aksesibel, difokuskan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas. Kerja sama ini menjadi kunci untuk memastikan setiap solusi yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas. Teknologi yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. (Layman & Disabilitas, 2022)

Selain dengan itu tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar juga mengembangkan program pendidikan berbasis digital dalam kerangka digitalisasi inklusi sosial bertujuan menyediakan akses pembelajaran yang setara dan ramah bagi penyandang disabilitas. Program ini berfokus pada peningkatan literasi digital dasar, penguatan keterampilan akademik maupun vokasional, serta dukungan kemandirian melalui pemanfaatan teknologi. Upaya yang dilakukan meliputi pendukungan non-formal berbasis digital dengan modul belajar paket A-C yang dilengkapi media aksesibel seperti video bersubtitle, audio book, dan brosur digital. Untuk mendukungnya, dikembangkan pula platform daring "Makassar Belajar Inklusif" yang dapat diakses dengan berbagai pemangkas melalui fitur aksesibilitas.

Selain pendukungan akademik, Dinas Sosial juga memberikan pelatihan vokasional digital, seperti mengotik dengan screen reader, pembuatan konten audio atau podcast, dan desain grafis sederhana untuk membuka peluang kerja sesuai minat dan bakat. Layanan diberikan melalui pusat pembelajaran inklusif

digital di tingkat kota dan kabupaten, serta unit belajar keliling bagi wilayah yang terbatas akses. Program ini turut melibatkan keluarga dan pendamping dengan pelatihan literasi digital dan parenting inklusif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan setara dalam pendidikan digital sekaligus lebih siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan dunia kerja.

Dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis digital bagi penyandang disabilitas, pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Mekar menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur, di mana tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil serta ketersediaan perangkat teknologi baru yang masih terbatas dan mahal. Di samping itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi hambatan karena belum sepenuhnya tenaga pendidik maupun aparatur memahami metode pembelajaran inklusif dan pemanfaatan teknologi aksesibel. Hambatan lain muncul dari koordinasi lintas sektor, mengingat program ini membutuhkan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Diskominfo, Disdik, serta organisasi penyandang disabilitas yang sering kali memerlukan waktu panjang dalam penyelarasan kebijakan. Dari sisi pendanaan, anggaran yang tersedia di APBD masih terbatas sehingga menyulitkan penyediaan alat bantu maupun pengembangan platform pembelajaran digital. Tidak kalah penting, masih adanya stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas juga menjadi faktor penghambat implementasi program.

Sementara itu, penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat juga menghadapi tantangan tersendiri. Akses terhadap teknologi masih menjadi

pendidikan utama, karena tidak semua penyandang disabilitas memiliki gawai atau komputer pribadi, bahkan biaya internet. Hal ini juga sering menjadi hambatan bagi individu yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dari segi keterampilan, sebagian peserta masih minim pengetahuan dasar mengenai penggunaan aplikasi digital sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Hambatan fisik dan sensorik juga turut memengaruhi, misalnya penyandang tunanetra yang membutuhkan screen reader atau penyandang tuli yang membutuhkan layanan penafsiran bahasa isyarat, yang jika tidak tersedia akan menghambat proses belajar. Selain itu, banyak penyandang disabilitas masih beranggapan pada peran pendamping atau keluarga, sehingga apabila pendamping tidak tersedia, proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Faktor psikologis seperti rasa minder, rendah diri, serta stigma dari lingkungan sekitar juga membuat sebagian penyandang disabilitas kurang percaya diri untuk aktif berpartisipasi dalam pendidikan berbasis digital.

Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan di Makassar perlu untuk bekerja sama dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi teknologi yang mendukung inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, sehingga tercipta kota yang benar-benar ramah bagi semua warganya.

Beritasakian pengelasan melalui latar belakang maka untuk permasalahan diatas penulis tertarik menulis tentang "Strategi penerapan Metode Digitalisasi Inklusi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang serta masalah yang telah dipaparkan, dapat disusun rumusan masalah, yakni bagaimana Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah yang tepat dalam digitalisasi inklusif sosial dan dapat meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar.

b. Ditambahkan, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa di Kota Makassar, terutama dalam memahami konsep dan teori yang relevan serta memberikan informasi dan data terkait penelitian tentang Strategi pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kota Makassar Manfaat Praktis.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbuangah pemikiran mengenai strategi pemerintah dalam mendorong digitalisasi inklusif sosial bagi

penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, serta memberi manfaat nyata bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman.



ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.papanda.org Internet Source	3%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
8	d-tarsidi.blogspot.com Internet Source	<1%
9	id.123dok.com Internet Source	<1%
10	es.scribd.com Internet Source	<1%
11	id.scribd.com Internet Source	<1%

12

Internet Source

<1 %

13

propionagreat.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes ☐

Exclude matches ☐

Exclude bibliography ☐



Ayuwarni Septania
105611121018 BAB II

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Aug-2025 12:41 PM (UTC+0700)

Submission ID: 2736726322

File name: BAB_II_AYUWARNI_SEPTANIA.docx(39.13K)

Word count: 4684

Character count: 33489

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penunjang, sekaligus sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya, serta membantu mengprosedur penelitian yang sedang dilakukan dan menemukan keterbatasannya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Chandra, Dhanesya, Luthi, Momi, Subandito dan Damayanti (2020)	Manajemen Pemasangan Disabilitas Fisik Terbatas Pekerjaan Di Kelurahan Cipinang Kacamatan Pulojaya Kabupaten Puncakerta	Metode penelitian tindakan partisipatif	Penelitian ini bertujuan untuk mendukung terjadinya perubahan pada organisasi maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat keterbatasan penyandang disabilitas fisik terdapat dasar kerja di Kelurahan Cipinang masih tergolong rendah. Kebijakan sejalan dengan permasalahan dan masalah persoalan besangan pekerjaan di wilayah tersebut yang sebelumnya menjadi penyandang disabilitas fisik dapat memperoleh kesempatan kerja yang layak.

2	Riki Dharmawan 2019	Pemberdayaan Peningkatan Disabilitas Fisik Melalui Dilatih Rehabilitasi Sosial Pengembangan Disabilitas Fisik Widyajaya Dr. Makenan Santi Ujaya Untuk Memahami Kreativitas	Metode Penelitian Kualitatif	Proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Pengembangan Disabilitas Fisik (BRSPDF) Widyajaya, sekolah, mampu meningkatkan kesadaran pada diri penyandang disabilitas fisik. Dengan tujuan yang memiliki pemahaman, selama proses belajar menunjukkan perkembangan positif, serta bisa meningkatkan rasa percaya diri, ketertarikan, aktif, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kreativitas yang mereka miliki menjadi lebih penting untuk lebih banyak guna di masa mendatang. Hal ini untuk dan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai karya, seperti seni dan sebagainya. Setelah itu, mereka akan lebih banyak belajar, seperti seni berbakat karya, dan berbagai produk lainnya. Proses tersebut akan menambahkan kemenduran bagi penyandang disabilitas fisik badan BRSPDF Widyajaya. Studi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penyediaan fasilitas untuk disabilitas, serta bisa ketersediaan karya, hobi, penguasaan tangan, serta keterampilan. Penguasaan teknologi juga dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan aksesibilitas, sehingga meningkatkan peluang yang akan sangat penting bagi mereka untuk bisa lebih banyak berkontribusi dalam masyarakat, serta akan dan berkontribusi disabilitas sangat diperlukan guna mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif. Penelitian ini akan berkontribusi sebagai langkah strategis, yakni peningkatan akses publik, pengantar, regulasi, serta
3	Bernadine Ciptama Puri, Dhanu Nani Akhil dan Gun Gun Gunith 2024	Alachilwa Lilik Dagi Pengembangan Disabilitas Di Suma Tanyadu Pengudi Lufur Bekas	Metode Penelitian Kualitatif	Studi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penyediaan fasilitas untuk disabilitas, serta bisa ketersediaan karya, hobi, penguasaan tangan, serta keterampilan. Penguasaan teknologi juga dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan aksesibilitas, sehingga meningkatkan peluang yang akan sangat penting bagi mereka untuk bisa lebih banyak berkontribusi dalam masyarakat, serta akan dan berkontribusi disabilitas sangat diperlukan guna mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif. Penelitian ini akan berkontribusi sebagai langkah strategis, yakni peningkatan akses publik, pengantar, regulasi, serta

			ketertarikan aktif penyandang disabilitas dalam proses penyalahgunaan sebagai upaya penting untuk mencapai aksesibilitas yang lebih optimal.
4	Nurul Aldha Masliddina Siragusa dan Aric Perbuntan 2020	Metawati Sigma Disabilitas Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggangharjo	Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian yang dilakukan oleh [Fitri Chandra Jellanyah Letya](#), [Meis Schindlauer](#), dan [Diering Lidjari](#) (2020) membahas mengenai [Aksesibilitas](#) penyandang disabilitas fisik terhadap lapangan pekerjaan di Kelurahan Cipanas Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan metode penelitian tindakan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak permasalahan atau hambatan penyedia pekerjaan di wilayah tersebut, penyandang disabilitas fisik masih

kesulitan memperoleh pekerjaan karena aksesibilitas yang belum memadai. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan pada organisasi dan masyarakat agar lingkungan kerja lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, penelitian Riski Triandari (2019) menggunakan metode kualitatif untuk menilai Upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik dilaksanakan melalui Bina Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDP) Widyadarmika Mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan selama enam bulan mampu meningkatkan kepercayaan diri, kreativitas, hasil kerja, dan kemampuan adaptasi penyandang disabilitas dengan lingkungannya. Para peserta mulai bukan telah menghasilkan berbagai karya seperti jam dinding, tas kulit, kempis, dan tempat tisu, yang menunjukkan pertumbuhan kemandirian serta kemandirian mereka untuk berlaya guna di masyarakat.

Menurut penelitian Bernadette Filiana Putri Dewi Nara Ariqah, dan Gus Gus Gunila (2024), yang menilai aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di Samudra Tropic Pengaruh Labor Bekas dengan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa fasilitas ramah disabilitas seperti ramp, lift, pegangan tangan, dan toilet aksesibel sudah mulai tersedia. Teknologi pun dipandang berpotensi memperbaiki aksesibilitas melalui inovasi, termasuk aplikasi peta rute aksesibel dan perangkat bantu berbasis teknologi. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas, yang didukung dengan edukasi publik, pengujian

regulasi, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif.

Terakhir, penelitian Neni Akbar Maulidini Siregar dan Arie Parhantara (2020) menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji strategi pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo memberikan bimbingan pemerintah desa berhasil mengubah stigma diskriminatif menjadi langkah konkret pemberdayaan. Penyandang disabilitas difokuskan peran sebagai subjek pembangunan melalui keaktifan dalam penerapan budaya dan kearifan. Melalui partisipasi tersebut, mereka mendorong untuk lebih mandiri, dapat merencanakan kebutuhan hidup, serta memperoleh pemerintahan yang lebih baik dari masyarakat desa.

B. Konsep Tiori

1. Konsep Strategi

Secara umum, strategi merupakan serangkaian rencana atau langkah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, pendidikan, dan pemberdayaan sosial, strategi berfungsi sebagai panduan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif menghadapi tantangan. Hal melibatkan pencapaian sasaran yang diinginkan. Strategi inklusif, misalnya, berorientasi pada penghapusan hambatan partisipasi dan menciptakan kontribusi yang setara bagi semua pihak, khususnya kelompok yang selama ini sepinggirkan (Hadianto, 2025).

Dalam dunia pendidikan, strategi inklusif menjadi salah satu pendekatan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan memastikan semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki kesempatan belajar yang sama. Strategi ini mencakup adaptasi kurikulum, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. (Rena Harasyani dkk., 2023) menekankan bahwa strategi pembelajaran inklusif harus mengedepankan kolaborasi antar siswa, modifikasi perangkat ajar, dan dukungan tambahan agar perkembangan akademik dan sosial anak inklusif dapat terpenuhi dengan baik.

Selain dalam konteks sekolah dasar hingga menengah, strategi inklusif juga relevan di perguruan tinggi. Penelitian Muhibbin (2021) menunjukkan bahwa pengembangan strategi inklusif di kampus menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur ramah difabel, paradigma diskriminatif, dan kurangnya kompetensi dosen dalam menangani mahasiswa disabilitas. Untuk mengatasinya, strategi yang direkomendasikan mencakup pengaman regulasi, penyediaan fasilitas aksesibilitas, pendampingan mahasiswa difabel, dan pengembangan model pembelajaran adaptif (Muhibbin, 2021). Strategi semacam ini mendorong kampus menjadi lingkungan belajar yang adil dan kolaboratif bagi semua mahasiswa.

Di tingkat praktik pembelajaran, strategi tidak hanya terkait dengan kebijakan makro, tetapi juga menyentuh metode dan teknik pembelajaran di kelas. Mulyani & Abdurasyid (2021) meneliti strategi guru di SDN Anur

Dari 1 Marhaban, yang menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk ADK. Guru menggunakan strategi pengalangan minat, pendekatan individual, dan pembinaan motivasi untuk memastikan siswa ADK dapat mengikuti pembelajaran secara efektif, meskipun terdapat keterbatasan fasilitas dan ketiduan guru pendamping khusus (Mulyani & Abdinayah, 2021).

Dalam konteks organisasi dan dunia kerja, strategi inklusif juga dapat diterapkan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Arjanto dkk. (2024) menekankan bahwa strategi pelatihan yang bersifat inklusif, seperti lokakarya kreatifitas budaya, mentoring lintas budaya, dan komunitas efektif antar karyawan beragam, mampu meningkatkan keterlibatan dan kinerja karyawan di tengah keberagaman. Dukungan manajemen dan fleksibilitas dalam desain pelatihan menjadi faktor kunci keberhasilan strategi inklusif ini.

Dari keseluruhan kajian, terlihat bahwa konsep strategi bersifat adaptif dan kontekstual. Dalam pendidikan, strategi inklusif membantu merumpi kesenjangan akses dan partisipasi bagi peserta didik yang berbeda latar belakang. Di dunia kerja, strategi inklusif memperkuat budaya kolaborasi dan mendorong produktivitas dalam lingkungan multikultural. Dengan perencanaan yang tepat, implementasi yang konsisten, dan dukungan sumber daya yang memadai, strategi inklusif mampu menjadi instrumen utama untuk menciptakan sistem yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Konsep Inklusi Sosial

Secara etimologis, istilah inklusi berasal dari bahasa Latin *inclusio* yang berarti "penyertaan" atau "memasukkan" sesuatu ke dalam suatu kelompok atau struktur sosial. Kata ini dibentuk dari gabungan *in-* (di dalam) dan *claudere* (menutupi) sehingga secara harfiah bermakna tindakan memasukkan individu atau kelompok agar tidak terasingkan dari sistem sosial yang ada (Oxford, 2024). Dalam perkembangannya, istilah inklusi digunakan untuk merujuk pada praktik dan kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang selama ini marjinal dan terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin, dapat memanfaatkan yang selama terdapat sumber daya, layanan publik, dan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, inklusi sosial merupakan sintesis dari eksklusivitas sosial. Eksklusivitas sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari akses sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk berperan dalam kehidupan masyarakat (Gentara & Widayatseno, 2020). Inklusi sosial hadir untuk mengatasi kondisi ini dengan memberikan peluang dan kesempatan agar individu yang sebelumnya terpinggirkan dapat berpartisipasi aktif, memperoleh haknya, dan diakui sebagai bagian dari komunitas. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas tidak cukup hanya "diberi akses", tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program sosial yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam praktiknya, inklusi sosial mencakup tiga aspek utama:

- a. Kesetaraan akses terhadap layanan publik dan sumber daya, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang kerja.
- b. Partisipasi penuh dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik tanpa diskriminasi.
- c. Penerimaan dan pengakuan atas keberagaman individu dalam komunitas, sehingga keberadaan kelompok rentan tidak hanya ditoleransi tetapi juga diapresiasi sebagai bagian dari kekuatan sosial.

Hasil penelitian Muhtia & Fauziah (2024) menunjukkan bahwa inklusi sosial memerlukan *action plan* yang rinci dan sistematis, program layanan yang melibatkan kontribusi masyarakat dan kolaborasi dengan komunitas disabilitas. Studi mereka di Perpustakaan Kota Bogor menekankan pentingnya *main e-lenten* (main inklusi sosial: penyediaan koleksi yang aksesibel (misalnya buku braille), penghindaran hambatan fisik, kemitraan dengan organisasi disabilitas, pengembangan program rutin yang melibatkan difabel, pelatihan staf, dan promosi layanan agar kelompok rentan/marginalisasi baik dan akses mereka.

Selain itu, transformasi layanan publik berbasis inklusi sosial telah terbukti menjadi salah satu strategi pembangunan masyarakat. Kurniasih & Saefullah (2021) menekankan pentingnya diperluas Kampanye yang tidak lagi hanya berlangsung sebagai kegiatan

perumahan-buku, tetapi juga sebagai ruang komunitas inklusif. Perpustakaan ini menyediakan layanan kreatif seperti kelas fotografi, jurnalistik, pelatihan berbasis TIK, dan ruang maker space yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk pemandang disabilitas, untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa inklusi sosial dapat diwujudkan melalui pemberdayaan berbasis komunitas yang memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar warga.

Penerapan inklusi sosial di Indonesia juga sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) 2016, khususnya prinsip "Leave No One Behind". Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan harus menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, marginal, dan disabilitas (Aliendiana & Murnaningtyas, 2010). Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi Konvensi PIDH tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 menjadi dasar hukum untuk memastikan setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum/hak asasi dan akses yang setara dalam kehidupan sosial.

Lelaki lanjut, Murnaningtyah & Widiyati (2021) menyatakan bahwa inklusi sosial yang diterapkan di tingkat komunitas, seperti desa inklusif di Kulon Progo, mampu menciptakan lingkungan sosial yang ramah disabilitas. Desa ini membentuk Forum Disabilitas untuk memastikan

partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menyediakan fasilitas publik rumah difabel dan program pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan lokal. Praktik ini menegaskan bahwa inklusi sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus berbentuk tindakan nyata yang mengubah struktur sosial agar lebih adil dan partisipatif.

Demikian demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial adalah praktik strategis dari kebijakan yang menghubungkan kebijakan, layanan publik, dan pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan pengakuan sosial. Inklusi sosial menuntut perubahan paradigma, dari sekadar menyediakan akses menuju menciptakan partisipasi bermakna bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, peningkatan inklusi sosial tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat secara keseluruhan melalui keberagaman perspektif, pengalaman, dan kontribusi.

3. Pengertian Disabilitas Fisik

Disabilitas menurut Komisi Nasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (KNHHD) didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan yang mengakibatkan atau menghalangi seseorang tidak mampu untuk melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang setara. Disabilitas disebabkan sebagai suatu kelompok yang menyebabkan keterbatasan atau hambatan dalam melakukan aktivitas. Sementara itu, penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami gangguan pada tubuhnya,

baik berupa kerusakan pada anggota badan, cacat akibat kecelakaan atau pembedahan, kelainan bentuk, maupun penurunan fungsi tubuh yang terjadi sejak lahir atau akibat penyakit yang dialami. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan nyata dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Menurut de Smet, Walle, Haudt, Ouguelomme (2010), disabilitas merupakan **kondisi atau** berkurangnya fungsi tubuh yang berdampak pada **kemampuan diri** maupun **memerlukan** seseorang dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini menyebabkan individu tidak dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan kemampuan normal, dan secara signifikan dalam tingkat individu. (Ali, Murti, Ansh, Nurkhotimah, Xhaani, (Vogelstein, 2010), N:88.)

Permasalahan dalam masalah dapat dikategorikan sebagai disabilitas adalah kondisi seseorang yang memiliki perbedaan kemampuan dibandingkan dengan individu pada umumnya, sehingga menimbulkan keterbatasan fisik maupun mental. Selain itu, adanya hambatan sosial juga turut berpengaruh sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas.

4. Hak-hak penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup sejahtera, memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan publik, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Pada 2011, UNCTD (1947) menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memiliki kesempatan dan manfaat yang setara.

dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian ini menjadi landasan konstitusional untuk memastikan perlindungan bagi penyandang disabilitas (Ridwan, 2013).

Kemudian hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin dikuatkan dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengadopsi prinsip-prinsip *Consentment to the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Konvensi internasional ini menekankan delapan prinsip utama, di antaranya penghormatan terhadap martabat yang setara (inherent dignity), non-diskriminasi, partisipasi penuh dalam masyarakat, kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas (Violetta & Siretyu, 2023).

Dengan prinsip ini, penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Salah satu hak istimewa yang menjadi prioritas adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa proporsi pekerja disabilitas di Indonesia masih sangat rendah, dan sebagian besar bekerja di sektor informal atau wiraswasta mandiri. Diskriminasi dalam kesempatan dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi penghambat utama pemenuhan hak ini. Padahal, UU No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden No. 60 Tahun

mengoptimalkan pelayanan dan membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memberdayakan mereka melalui pengakuan dan kesetaraan kerja yang setara.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas memerlukan sinergi antara regulasi, implementasi, dan perubahan paradigma sosial. Negara wajib menjamin perlindungan hukum dan kesempatan kesetaraan, sehingga masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan bebas stigma. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

5. Faktor-faktor penyebab disabilitas fisik

Disabilitas fisik ¹² **adalah** yang berasal karena trauma yang **didapatkan** dapat disebabkan oleh faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Menurut Agustinus (2021), penyebab disabilitas fisik dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar, yaitu: seperti gangguan genetik dan kekurangan nutrisi selama kehamilan, serta lahir, yang melibatkan komplikasi dalam proses persalinan dan pasca-lahir, seperti kelahiran, infeksi, atau trauma. Dalam konteks disabilitas digital, keterbatasan fisik yang berasal dari tubuh ini menjadi penghalang utama untuk mengakses teknologi secara merata, terutama ketika tidak ada intervensi media atau rehabilitasi yang memadai.

Sementara itu, dari sisi sosial dan lingkungan, Surullah (2020) menyoroti bahwa kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan khusus, serta minimnya kesadaran orang tua terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus merupakan faktor-faktor yang turut memperburuk kondisi disabilitas fisik menjadi disabilitas digital. Anak-anak dengan disabilitas yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan fasilitas teknologi adaptif seperti perangkat/mak pendukung atau alat bantu komunikasi, sehingga mereka tertinggal dari ekosistem digital sejak dini.

Dalam suatu literatur yang dilakukan oleh [Rahmat Harnadiah](#) Wicak dan [Hence Deyon Valentina](#) (2024), disimpulkan bahwa resiliensi penyandang disabilitas fisik [dapat](#) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi [kemampuan](#) [self-efficacy](#), kemampuan coping, dan fleksibilitas kognitif, sedangkan faktor eksternal terdiri dari dukungan orang tua dan teman sebaya. Kurangnya dukungan ini membuat penyandang disabilitas fisik lebih rentan terhadap penarikan diri, depresi, dan hilangnya motivasi untuk berinteraksi dengan lingkungan digital. Ketika resiliensi rendah, akses dan penggunaan teknologi digital juga menjadi sangat terbatas.

Lain juga, Wisner juga mengutip beberapa penelitian lain (seperti dari Miller et al., Ipa & Krimawati, dan Larasati & Setiwa) yang menunjukkan bahwa trauma akibat kecelakaan, diskriminasi sosial, dan kurangnya rasa percaya diri adalah hambatan psikologis yang signifikan

dalam membangun resiliensi. Dalam konteks digital, hambatan ini berkontribusi pada terjadinya disabilitas fisik digital, yaitu kondisi di mana individu tidak hanya terbatas secara fisik tetapi juga tidak mampu mengakses dunia digital secara efektif karena hambatan mental, sosial, dan teknologi.

6. Aksesibilitas dan Teknologi Digital

Di era digital saat ini, akses terhadap sumber daya informasi dan komunikasi menjadi sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan. Di negara berkembang, teknologi digital menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi berbagai hambatan seperti kurangnya tenaga pengajar, keterbatasan sarana pendidikan, dan jarak geografis yang menyulitkan pemerataan pendidikan. Caroline dan Aslan (2025) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas, bahkan bagi siswa di daerah terpencil. Mereka menambahkan bahwa teknologi dapat menyediakan materi pendidikan berkualitas tinggi secara setara tanpa memandang lokasi.

Karena demikian, membuat teknologi tidak bisa diabaikan oleh semua kalangan, semua media. Tantangan seperti ketersediaan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor utama penghambat aksesibilitas. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Dina Zahenur N'nuhi, Evi Darmalah, dan Aida Arizah (2021), yang menyatakan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran seperti kemudahan

belajar di mana saja dan kapan saja—fakta di lapangan menunjukkan masih banyak siswa yang tidak memiliki perangkat memadai untuk koneksi internet yang stabil. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.

Kesenjangan digital juga terpasir nyata antara pelajar di perkotaan dan pedesaan. Aslan, Mide, Nadjih M., dan Saputomo (2017) dalam studi mereka menunjukkan bahwa pelajar di kota memiliki akses dan pemanfaatan media baru yang lebih tinggi dibandingkan pelajar di desa. Perbedaan ini bukan hanya terkait fasilitas, tetapi juga menyangkut motivasi, keterampilan, dan dukungan lingkungan. Media baru seperti internet dan aplikasi digital lebih umum digunakan oleh pelajar kota dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial, sementara pelajar di desa masih tertinggal karena hambatan akses dan keterbatasan sumber daya.

Studi lain oleh Halhyanto, Refki Aulia, dan Nurul dan Nurul Ramadani (2024) meneliti aksesi internet dan dampaknya terhadap literasi digital di kalangan pemuda desa. Mereka menemukan bahwa kepemilikan perangkat digital, biaya internet, dan frekuensi penggunaan internet memiliki korelasi signifikan terhadap keterampilan digital pemuda. Namun demikian, meskipun penggunaan internet tinggi, belum tentu dibarengi dengan pemahaman yang dalam bermedia digital. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi etika dan budaya digital.

Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, penelitian oleh Nur Azizah, Muhammad Duffa Firda, Po Abas Samiya, dan Nur Silawati (2025) menunjukkan bahwa aksesibilitas dan literasi digital memainkan peran besar dalam efektivitas pembelajaran. Mereka menggunakan pendekatan kuantitatif untuk membuktikan bahwa kuantitas akses terhadap teknologi, dipadukan dengan persepsi positif terhadap teknologi tersebut, meningkatkan tingkat adopsi dan efektivitas pembelajaran digital. Temuan mereka juga menggarisbawahi bahwa peserta didik dari daerah perkotaan lebih mampu mengoptimalkan pembelajaran digital dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan, karena perbedaan infrastruktur dan pengalaman menggunakan teknologi.

Kesimpulan dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan literasi digital tidak bisa dipisahkan dalam proses transformasi pendidikan modern. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan inklusif, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur digital yang merata, memberikan pelatihan literasi digital, serta menyediakan perangkat yang terjangkau. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, keunggulan digital dapat dikuatkan dan potensi teknologi dapat dimaksimalkan demi menciptakan masyarakat pembelajar yang unggul secara digital.

7. Inklusi Digital

Dikutip dari (Purwati, dkk., 2024) **kehadiran digital menurut Santen (2020)**, didefinisikan sebagai **kecenderungan individu untuk melakukan dalam upaya memenuhi suatu seruan peluang akses, pengetahuan, dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi khususnya internet**.

Ian van Dijk (2020) menyatakan bahwa inklusi digital dapat terbagi apabila masyarakat memiliki **akses, motivasi, akses, keahlian, akses keterampilan, dan akses pengetahuan**. Setelah kegiatan tersebut ini merupakan syarat utama seseorang dapat memanfaatkan teknologi digital secara penuh. Sedangkan ITU (2021) menegaskan bahwa inklusi digital merupakan upaya menyediakan akses setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan, dengan tujuan meningkatkan konektivitas universal dan akses digital yang bermakna.

Berbagai individu yang memiliki makna serupa **digital digital** antara lain **literasi digital, partisipasi digital, dan akses digital**. Semua istilah ini pada dasarnya **melibatkan partisipasi, literasi digital, kemampuan dalam berinteraksi dengan teknologi digital, kemampuan literasi, akses, dan keterampilan**. **literasi, akses, serta kemampuan akses** merupakan beberapa kebutuhan yang dimiliki. (The Walter Christopher Center with Carnegie UK Trust, 2018)

Aspek konsep dalam mewujudkan **inklusi digital menurut Dijk (2020)** terdiri dari:
a. akses motivasi

Merupakan tahap awal dimana individu memiliki keinginan atau keinginan untuk menggunakan teknologi digital. Biasanya orang yang enggan menggunakan teknologi karena merasa tidak perlu, takut salah, atau menganggap terlalu rumit. Oleh karena itu, membangun motivasi sangat penting agar penyandang disabilitas maupun masyarakat umum terdorong untuk mencoba memanfaatkan layanan digital.

b. akses material

Hubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses teknologi. Misalnya, ketersediaan perangkat (smartphone, komputer), jaringan internet yang memadai, serta infrastruktur pendukung seperti pusat layanan berbasis digital. Bagi penyandang disabilitas, akses material juga mencakup perangkat adaptif seperti screen reader, keyboard khusus, atau aplikasi pendukung yang membuat teknologi lebih mudah digunakan.

c. akses keterampilan

Mengacu pada kemampuan individu dalam mengoperasikan teknologi digital secara efektif. Ini mencakup keterampilan dasar (misalnya cara menggunakan smartphone, aplikasi, atau internet) hingga keterampilan tingkat lanjut (seperti memahami keamanan digital, mencari informasi, atau memanfaatkan platform pelatihan daring). Pendidikan digital dan pelatihan khusus sangat penting agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan kompetensi ini.

d. akses penggunaan

Tahap di mana teknologi digital benar-benar dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar memiliki pemgku dan keterampilan, tetapi juga bagaimana individu memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan nyata: mencari informasi, bekerja, berinteraksi sosial, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun layanan publik. Pada level ini, digitalisasi individu harus memastikan bahwa penggunaan teknologi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup, terutama bagi penyandang disabilitas.

Administrasi publik di era digital mendorong adaptasi penyandang disabilitas terhadap teknologi. Sementara itu, aksesibilitas merupakan keterampilan penting dan suatu aspek pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, akses keterampilan meningkatkan kemampuan yang diperoleh untuk menggunakan teknologi secara efisien dan efektif. Terakhir, terdapat aspek terhadap pemanfaatan teknologi ini sendiri, yang menjadi tahap akhir dalam pemanfaatan teknologi dalam kehidupan digital optimal.

B. Kaitan Relevansi Strategi Pemerintah dengan Administrasi Negara

- Administrasi Negara sebagai Fungsi Pemerintahan Administrasi negara adalah seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan kebijakan, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Administrasi negara berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara melalui pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola yang baik (good governance).

b. Strategi Pemerintah sebagai Arah Kebijakan Strategi pemerintah adalah arah, rencana, dan langkah yang dipilih untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional. Strategi ini dapat berupa kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun program prioritas yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.

c. Ketan dan Relevansi

d. Implementasi aktivitas: Strategi pemerintah lainnya bisa berjalan efektif melalui administrasi negara, salah satunya negara merupakan pelaksana kebijakan publik di lapangan.

e. Koordinasi dan Integritas: Administrasi negara menjadi penghubung antara strategi pemerintah di tingkat pusat dengan implementasi di daerah, sehingga strategi yang dirumuskan dapat diwujudkan secara terkoordinasi.

f. Efisiensi dan efektivitas: Administrasi negara memanfaatkan strategi pemerintah dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang tepat, transparan, dan akuntabel.

g. Pelayanan publik: Strategi pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan digitalisasi, misalnya, hanya bisa diwujudkan masyarakat jika administrasi negara mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan merata.

h. Evaluasi dan pengawasan: Administrasi negara berfungsi untuk menilai apakah strategi pemerintah berjalan sesuai rencana atau perlu diperbaiki melalui mekanisme akuntabilitas publik.

i. Contoh Konkret

j. Transformasi digital nasional: Pemerintah memuncak strategi digitalisasi pelayanan publik. Relevansinya dengan administrasi negara adalah serikat pada bukras digital, e-government, dan sistem pelayanan terpadu.

k. Pembangunan berkelanjutan (SDGs): Pemerintah menyusun strategi pembangunan jangka panjang, sedangkan administrasi negara bertugas mengkoordinasikan program lingkungan di kementerian, daerah, dan masyarakat.

l. Reformasi birokrasi: Strategi pemerintah adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional; administrasi negara menjadi instrumen untuk melaksanakan reformasi tersebut.

Kesimpulannya, strategi pemerintah memberikan arah dan tujuan, sedangkan administrasi negara menyediakan sistem, mekanisme, dan sumber daya untuk melaksanakan strategi tersebut. Tanpa administrasi negara, strategi hanya akan berhenti di atas kertas, sebaliknya, tanpa strategi, administrasi negara kehilangan orientasi dalam melayani masyarakat.

1. C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori dan rujukan pustaka yang telah dipaparkan, fokus utama penelitian ini adalah strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Penelitian ini menekankan bagaimana strategi adalah strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial yang dikembangkan terkait dengan program digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Kerangka pikir ini menggambarkan hubungan antara kondisi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, tantangan aksesibilitas, strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial, dan hasil yang diharapkan berupa peningkatan partisipasi sosial dan kondisi hidup penyandang disabilitas fisik. Berikut skema Kerangka konsep penelitian: Gambar 1 Kerangka Pikir



2. D. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi sosial mereka. Dalam konteks pembangunan kota inklusif, [penyandang disabilitas fisik](#) merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas umum, transportasi, layanan publik, serta kesempatan kerja.

Strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusif sosial diyakini dapat menjadi salah satu inovasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh informasi, mengakses layanan sosial, serta mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian mereka. Penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi informasi digitalisasi, mulai dari keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman teknis di kalangan penyandang, hingga tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah.

Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kondisi aksesibilitas umum, analisis strategi yang efektif dalam perencanaan dan implementasi informasi digitalisasi, serta dampak potensial dari digitalisasi inklusif sosial terhadap peningkatan kualitas hidup dan partisipasi sosial penyandang

disabilitas fisik di Kota Makassar. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan inovasi teknologi yang lebih inklusif disabilitas.

3. E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemerintah melalui digitalisasi akses sosial yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, dengan menggunakan kerangka teori inklusi digital yang melibatkan 4 komponen utama : Akses, motivasi, akses material, akses keterampilan dan akses penggunaan.

1. Mengidentifikasi tingkat akses motivasi

Yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik untuk mampu mengakses informasi terkait digitalisasi akses sosial berbasis teknologi di Kota Makassar. Akses motivasi mencakup faktor psikologis dan sosial yang mendorong individu untuk mengadopsi teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

2. Menilai akses material yang tersedia

Sebagai perangkat keras (smartphone, komputer) dan koneksi internet yang dapat mendukung informasi digital oleh penyandang disabilitas fisik. Akses material menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa perangkat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas fisik.

3. Mengetahui akses keterampilan

Akses literasi digital merupakan aspek krusial dalam strategi digitalisasi inklusi sosial. Pemerintah perlu memastikan penyandang disabilitas baik memperoleh literasi digital melalui pelatihan dan **pendampingan berkelanjutan**, sehingga pemanfaatan teknologi tidak sekadar formalitas, melainkan sarana pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam layanan sosial digital.

4. Meningkatkan penggunaan digitalisasi sosial

Akses pengguna menekankan peran para penyandang disabilitas fisik. Strategi pemerintah melalui digitalisasi inklusi sosial harus memastikan bahwa teknologi tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah digunakan, relevan dengan kebutuhan, serta memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mereka.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uwks.ac.id	2%
	Internet Source	
2	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
	Internet Source	
3	core.ac.uk	1%
	Internet Source	
4	jurnal.poltekesos.ac.id	1%
	Internet Source	
5	stitalamin.ac.id	1%
	Internet Source	
6	J-Innovative.org	1%
	Internet Source	
7	irje.org	<1%
	Internet Source	
8	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet Source	
9	ejournal.uinbukittinggi.ac.id	<1%
	Internet Source	
10	news.detik.com	<1%
	Internet Source	
11	www.mkri.id	<1%
	Internet Source	
12	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet Source	

13	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
15	www.gendis.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	<1 %
17	Surant Elprido, Agnes Fitriantica. "Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Syarat Pembuatan SIM D Bagi Disabilitas", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022 Publication	<1 %
18	www.kangatepafia.com Internet Source	<1 %
19	bengkulutoday.com Internet Source	<1 %
20	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
22	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
24	Syeren Claudya Tuakora, Mike Jurnida Rolobessy, Rukoyah Rukoyah. "Pemenuhan	<1 %

Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi
Penyandang Disabilitas Di Kecamatan
Baguala Kota Ambon", Journal of Government
Science Studies, 2024

Publication

25	binus.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
27	es.scribd.com Internet Source	<1 %
28	konsultankarir.com Internet Source	<1 %
29	www.tribunnews.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
31	ajimmydj81.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	docplayer.info Internet Source	<1 %
33	edoc.pub Internet Source	<1 %
34	Id.scribd.com Internet Source	<1 %
35	journal.unipdu.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnal.lppm.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %

37	Internet Source	<1 %
38	www.indragiri.com Internet Source	<1 %
39	www.journal.unindra.ac.id Internet Source	<1 %
40	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
41	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
42	Donny Michael. "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
43	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes ☐

Exclude matches ☐

Exclude bibliography ☐

Ayuwarni Septania
105611121018 BAB III

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Aug-2025 12:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2736726524

File name: BAB_III_AYUWARNI_SEPTANIA.docx (18.59KB)

Word count: 1235

Character count: 8822

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan selama periode dua bulan, terhitung sejak dari awal Agustus hingga akhir Oktober 2025.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena sosial yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Penelitian ini berfokus pada strategi program aplikasi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, sehingga membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi aksesibilitas layanan sosial, tantangan dalam pengembangan aplikasi, serta strategi yang efektif dalam implementasinya.

Berdasarkan Sugiyono (2018:15), Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam situasi alam, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang tersedia diperoleh secara apa adanya, sehingga menghasilkan potret realistik mengenai situasi yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh

penahaman yang komprehensif tentang perilaku, persepsi, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi inklusif sosial oleh penyandang disabilitas.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipandang tepat dalam penelitian ini karena memungkinkan pengumpulan informasi secara mendalam dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pengembang aplikasi, komunitas disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi inovasi teknologi dalam mendukung inklusi sosial di Kota Makassar. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena fokusnya adalah untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara rinci tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang ada. Penelitian ini berfokus pada strategi program aplikasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi aksesibilitas layanan sosial, tantangan dalam pengembangan aplikasi, serta strategi yang efektif dalam implementasinya.

Menurut Sugiyono (2010:13), penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan mempelajari objek dalam situasi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Solongan penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan informasi dan data yang tersedia diperoleh secara apa adanya, sehingga menghasilkan potret mendalam mengenai situasi yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perilaku, persepsi, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi inklusif sosial oleh penyandang disabilitas.

Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dianggap tepat untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, pengembang aplikasi, komunitas disabilitas, dan masyarakat umum, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran inovasi teknologi dalam mendukung inklusi sosial di Kota Makassar.

B. Informan

Informan dalam studi ini adalah individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan program aplikasi untuk mendukung inklusi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman paling mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Informan penelitian ini mencakup:

Table 3.1 Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Staf Dinas Sosial	2
2	Orang tua Penyandang Disabilitas	3
3	Anak Berkebutuhan Khusus	3
Jumlah		8

Dengan melibatkan informan utama dan pendukung tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data secara mendalam dan menyeluruh mengenai strategi pengembangan program aplikasi inklusif sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengonfirmasi secara langsung situasi di lapangan yang terkait dengan aksesibilitas dan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Pengamatan ini mencakup fasilitas publik, layanan sosial, sarana transportasi, dan kegiatan pemberdayaan disabilitas yang terhubung dengan pengembangan program aplikasi inklusif sosial. Tujuan dari observasi ini adalah memperoleh informasi nyata mengenai hambatan dan peluang yang ada di lapangan sebagai data pendukung penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan kunci, yaitu penyandang disabilitas fisik, pengembang aplikasi, pihak pemerintah terkait, dan komunitas disabilitas di Kota Makassar. Teknik wawancara yang digunakan adalah *guided interview*, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi pengalaman dan pendapat informan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami tantangan, kebutuhan, serta strategi efektif dalam pengembangan dan implementasi aplikasi inklusif sosial.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen resmi, foto, dan laporan kegiatan, peraturan, dan data statistik terkait penyandang disabilitas di Kota Makassar. Dokumen yang dikumpulkan termasuk laporan Dinas Sosial, data

dari Unit Layanan Disabilitas (ULD), program pemberdayaan ekonomi, serta dokumentasi kegiatan komunitas disabilitas. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan bukti autentik yang mendukung analisis penelitian.

D. Teknik Pengabsahan Data

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua di lapangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Proses ini penting agar data yang dikumpulkan akurat, dapat dipercaya, dan mampu menggambarkan situasi yang terkait pengembangan program aplikasi media sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, teknik validasi data yang diterapkan meliputi pemeriksaan kembali oleh informan (member check), triangulasi sumber, serta konsultasi dengan ahli. Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali data hasil wawancara dan observasi kepada para informan, seperti penyandang disabilitas fisik, pihak pemerintah, pengembang aplikasi, dan komunitas disabilitas, sehingga informasi yang diperoleh peneliti sesuai dengan maksud informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Misalnya, informasi mengenai kondisi aksesibilitas penyandang disabilitas di fasilitas publik dibandingkan dengan dokumen resmi dari Dinas Sosial dan hasil pengamatan lapangan. Sementara itu, konsultasi ahli dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan pembimbing atau tenaga ahli untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran perbaikan sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan menerapkan ketiga teknik ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

E. Teknik Analisis Data

Sendi ini menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam terkait kondisi aksesibilitas, kualitas, serta strategi pengembangan program aplikasi indeks sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles, Huberman, & Saldaña (2018) yang meliputi tiga tahap utama: kondensasi data, pengujian data, dan pemrosesan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data dari lapangan direkam, difiksikan, dan disederhanakan agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga pola, hubungan, dan makna dari data dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir, yaitu pemrosesan kesimpulan, dilakukan oleh peneliti untuk menginterpretasikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai strategi pengembangan aplikasi indeks sosial dan dampaknya terhadap peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

1. Kondensasi data

Menurut Wokosidika (2022), data condensation adalah merupakan proses untuk menyederhanakan, mengorganisir, dan atau memvisualisasikan data agar memudahkan keterbacaan informasi. Proses ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, pengorganisasian, dan memvisualisasi data yang berasal dari catatan

lapangan, matriks, wawancara, dokumen, serta materi empiris lainnya. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan meringkas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengaitkan informasi yang diperoleh agar saling mendukung dan membentuk gambaran yang utuh."

2. Penyajian data

Data kualitatif dapat disajikan melalui bentuk, narasi, teks, catatan lapangan, matriks, grafik, diagram, pengkodean, dan lain-lain. Dengan cara ini, data menjadi terstruktur dan terbagas agar informasi dapat terlihat lebih jelas, sehingga meningkatkan pemahaman. Selain itu, penyajian data memungkinkan penulis untuk mengaitkan temuan dengan teori yang relevan dalam penelitian. Penarikan Kesimpulan

Wekas dkk. (2022) menjelaskan bahwa "memori simpulan atau verifikasi (concluding drawing and verification) penulis melakukan tahapan kualifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya berdasarkan kualifikasi data yang telah dibuat". Pada proses ini, penulis melakukan tahapan kualifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya berdasarkan kualifikasi data yang telah dibuat oleh penulis.

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II

Student Paper

2%

2

id.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Ayuwarni Septania
105611121018 BAB IV

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Aug-2025 12:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2736726895

File name: BAB-IV_AYUWARNI_SEPTANIA.docx (217.81KB)

Word count: 4434

Character count: 30689

BAHIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah administrasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Letak geografis Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan tergolong sebagai pintu gerbang menuju Kawasan Timur Indonesia. Secara astronomis, Kota Makassar berada pada posisi:

- $5^{\circ} 8' - 5^{\circ} 14'$ Lintang Selatan
- $119^{\circ} 24' - 119^{\circ} 32'$ Bujur Timur

Wilayah Kota Makassar berbatasan dengan:

Selatan Utara : Kabupaten Maros

Selatan Timur : Kabupaten Maros

Selatan Selatan : Kabupaten Gowa

Selatan Barat : Kota Makassar

Adapun Kantor Dinas Sosial Kota Makassar saat ini berlokasi di Jl. A. P.

Petrucci No. 72, Makassar, Sulawesi Selatan 90222, yang secara strategis berada di pusat kota sehingga memudahkan koordinasi pelayanan sosial terhadap masyarakat.

2. Profil Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab utama membantu Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial. Lembaga ini memegang peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesejahteraan sosial, terutama yang terkait dengan penanganan masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak terlantar, serta berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lainnya.

"Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial Kota Makassar memiliki peran strategis, seperti merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, memberdayakan masyarakat, menangani bencana sosial, serta melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab mengelola program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial di Kota Makassar."

Kantor Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jl. A. P. Pettarani No. 72, Makassar. Saat ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, beberapa bidang teknis, serta unit pelaksana teknis di lapangan. Dengan visi menciptakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adil, Dinas Sosial Kota Makassar terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

a. Misi

Mendorong Makassar menjadi kota global yang ramah, mandiri, dan cerdas melalui pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial bagi seluruh warganya.

b. Misi

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan reformasi tata kelola pemerintahan untuk menciptakan SDM kota yang kompeten dengan layanan publik profesional dan transparan.
- 2) Penguatan sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya untuk membangun ketahanan masyarakat dengan pemerataan ketahanan ekonomi dan lingkungan bagi seluruh warga.
- 3) Penguatan dan pengembangan ruang kota secara inklusif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, modern, dan cerdas bagi seluruh masyarakat.

4. Struktur Birokrasi Dinas Sosial Kota Makassar



5. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Keputusan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial. Sebagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan kota, Dinas Sosial mempunyai peran membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, melaksanakan kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dipercayakan kepada pemerintah kota.

a. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan terkait pelaksanaan urusan sosial;
2. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan urusan sosial;
4. Menyelenggarakan administrasi di lingkungan dinas;
5. Merencanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengendalikn, dan mengawasi seluruh program dan kegiatan sosial;
6. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, serta menyelenggarakan pelayanan administratif bagi seluruh unit di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan kewajibannya, Sekretaris menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional untuk urusan perencanaan, pelayanan, keuangan, urusan umum, dan kepegawaian;
2. Menjalankan urusan perencanaan, pelayanan, keuangan, urusan umum, dan kepegawaian;
3. Menjalankan dan mengoordinasikan pelaksanaan seluruh urusan perencanaan, pelayanan, keuangan, urusan umum, dan kepegawaian;

4. Melakukan pengawasan, evaluasi, serta penyusunan laporan atas pelaksanaan pembinaan, pelaporan, **kegiatan**, **akhlak umum**, dan **kepujasan**;
5. Melakukan tugas tambahan atau tugas lain dan amanat sesuai dengan kewenang.

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang ini bertanggung jawab menyelenggarakan program **pengabdian** dan pendampingan sosial, mendampingi keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), membina aktivitas tanggap bencana, serta melakukan penelitian dan penelitian terapan PMKS dan PSKS. Kepala Bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional untuk program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
2. Mengimplementasikan berbagai program dan **kegiatan** di **bidang** **kesejahteraan sosial**;
3. Mengkoordinasikan **pelaksanaan** seluruh **kegiatan** sosial agar berjalan terpadu;
4. Melakukan pengendalian, **evaluasi**, dan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan;
5. Melakukan tugas tambahan atau tugas khusus dan amanat sesuai dengan kewenang.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Unit ini bertanggung jawab menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok tunas sosial, serta melakukan pembinaan terhadap **anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan korban tindak kekerasan termasuk pekerja migran. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:**

1. Menyusun rencana operasional untuk kegiatan rehabilitasi sosial;
2. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi sosial;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi sosial;
4. Mengendalikan, mengawasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
5. Menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sosial kewenangan.

Bidang ini membawahi:

1. Seksi Pelayanan untuk Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengemis;
2. Seksi Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi untuk Tunas Sosial.

Tugas pokok mencakup perencanaan dan pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program, penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas dan tunas sosial.

perbaikan anak jalanan, penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, bimbingan usaha produktif, penanggulangan korban NAPZA dan HIV/AIDS, evaluasi tugas, pemberian asun/teknis, pembagian tugas dan pengawasan staf, serta pelaporan kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Pengendalian Humani dan Jalinan Kesejahteraan Sosial bertugas mengelola dan mengawasi seluruh pelayanan humanis sosial serta memastikan penerapan jalinan kesejahteraan. Bidang ini juga melakukan pemantauan terhadap kawasan rawan bencana dan pemukiman kumuh serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi keluarga miskin dan korban bencana. Kepala Bidang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program, melakukan pengendalian serta evaluasi, menyusun laporan/kegiatan, serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang ini bertugas mendukung Kepala Dinas Sosial dalam membina dan memberikan layanan kepada organisasi sosial/TSM, anak asuhan, serta mengawasi kegiatan pengungkapan kebutuhan sosial dan manfaat berbadan. Selain itu, Bidang ini juga bertanggung jawab membina nilai-nilai kepedulian, kepedulian, dan solidaritas sosial. Kepala Bidang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan, serta melaksanakan tugas tambahan sesuai arahan atasan.

g. Jabatan Fungsional

Dalam struktur Dinas Sosial Kota Makassar dapat ditetapkan berbagai jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan-jabatan tersebut bertugas melaksanakan aktivitas berdasarkan keahlian masing-masing. Setiap kelompok jabatan fungsional terdiri dari beragam spesialisasi yang dikelompokkan oleh tenaga fungsional senior, dan jumlah personel ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi, tipe pekerjaan, serta beban kerja.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Strategi Pemecatan Melalui Digitalisasi Ekshatif Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tindak Kota Makassar, dalam hal ini dapat diidentifikasi dengan 4 indikator yang dikelompokkan oleh Indira Digital Pomeranti (Ika, 2024) yaitu: Akses Motivasi, Akses Material, Akses Keterampilan, Akses Partisipasi.

Berikut adalah data penyandang Disabilitas tahun 2022-2025 di Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	2022	30.409
2	2023	30.373
3	2024	30.028

(Sumber: Bappedahingga Makassar, Dinas Sosial)

1. Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Akses motivasi memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas baik di era digital. Dorongan internal seperti rasa ingin tahu, ketahanan akan ilmu, serta keinginan untuk mandiri menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk tetap semangat belajar

meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Di sisi lain, dukungan eksternal dari keluarga, guru, komunitas, dan pemerintah juga berperan besar dalam memberikan semangat serta kepercayaan diri agar penyandang disabilitas benar-benar memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendidikan. Motivasi yang kuat ini membuat mereka lebih terbuka untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran modern yang berbasis digital.

Dalam praktiknya, akses motivasi tercipta dari kemauan serta disabilitas untuk mempelajari keterampilan digital yang mendukung kegiatan belajar. Keyakinan bahwa teknologi dapat memudahkan mereka memahami materi pelajaran, serta kebutuhan untuk menggunakan platform pendidikan daring dan aplikasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya datang dari partisipasi mereka dalam pembelajaran, tetapi juga membangun keyakinan bahwa teknologi dapat menjadi jalan menuju kemudahan dan kesetaraan dalam menuntut ilmu pendidikan. Dengan demikian, akses motivasi berperan sebagai pondasi utama agar penyandang disabilitas fisik mampu memanfaatkan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara terkait Motivasi Tingkat Akses Mahasiswa dari Seorang Penyandang Disabilitas:

"Sejak sekolah saya memang sering merasa tertinggal karena keterbatasan fisik. Kadang saya malu kalau tidak bisa ikut kegiatan seperti teman-teman lain. Tapi waktu guru memperkenalkan komputer di sekolah, saya mulai sadar kalau lewat teknologi saya bisa belajar dengan cara yang lebih mudah. Dari situ muncul motivasi, bahwa keterbatasan bukan berarti saya tidak bisa maju." (Hasil Wawancara dengan R.T, 21 Agustus 2025)

la menjalankan bahwa pendidikan, baik di sekolah maupun di luar, membuatnya termotivasi untuk terus belajar menggunakan teknologi:

"Tidakk saya cuma bisa baca buku pelan-pelan. Tapi setelah tahu ada aplikasi pembaca layar dan e-book, saya jadi lebih semangat belajar. Rasanya seperti dapat pintu baru untuk mengakses ilmu. Saya jadi termotivasi untuk tidak berhenti sekolah, karena sekarang saya bisa belajar melalui lewat teknologi." (Hasil Wawancara dengan RT, 21 Agustus 2024)

Wawancara ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam memotivasi penyandang disabilitas fisik untuk memanfaatkan teknologi. Pengetahuan komputer, aplikasi pembaca layar, dan e-book membuat mereka lebih percaya diri, semangat belajar, serta menyadari bahwa keterampilan fisik bukan penghalang untuk maju.

Selanjutnya wawancara dengan orang tua murid penyandang disabilitas.

"Sebagai orang tua, saya ingin anak saya terus bisa sekolah dan punya masa depan yang baik. Saya tahu keterbatasan fisiknya membuat dia sering minder, apalagi kalau dibandingkan dengan teman-temannya. Tapi saya selalu katakan, pendidikan itu penting, dan sekarang teknologi bisa membantu. Misalnya, saya ajarkan cara pakai HP untuk cari materi pelajaran di YouTube atau aplikasi belajar. Walaupun dia belajar pelan-pelan, saya lihat motivasinya tumbuh. Dia jadi lebih percaya diri karena bisa ikut belajar seperti teman-temannya." (Hasil Wawancara dengan Ibu NY, 21 Agustus 2023)

Orang tua ini juga menekankan bahwa dukungan keluarga adalah kunci agar anak tetap bersemangat:

"Kalau anak menyanyi, saya selalu beri dukungan. Saya bilang, teknologi itu alat, kalau kita bisa gunakan dengan baik, pendidikan jadi lebih mudah. Dukungan keluarga sangat penting, karena anak butuh diyakinkan bahwa dia mampu. Dari situ motivasinya muncul." (Hasil Wawancara dengan Ibu NY, 21 Agustus 2023)

Dekatgus keluarga, khususnya orang tua, berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar penyandang disabilitas fisik. Melalui dukungan emosional dan bimbingan penggunaan teknologi, anak merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk terus menempuh pendidikan, meski memiliki keterbatasan fisik.

Seorang staf Dinas Sosial Kota Makassar menyampaikan perannya dalam mendukung pendidikan inklusi berbasis digital:

"Kami melihat bahwa motivasi penyandang disabilitas fisik dalam menempuh pendidikan berbasis digital sangat besar, bahwa ada sering terkendala keterampilan dan fasilitas. Karena itu, kami membuat program pelatihan literasi digital, supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Tujuan kami bukan hanya meningkatkan skillnya, tetapi juga membangun semangat belajar bahwa mereka punya hak yang sama dalam pendidikan." (Hind, Wawancara dengan Ibu HA, 22 Agustus 2025)

Ibu HA juga menekankan bahwa pendidikan digital menjadi kunci untuk kemandirian:

"Ketika mereka menguasai pelatihan, kami melihat antusiasme yang tinggi. Ada rasa percaya diri yang tumbuh karena mereka tahu bisa belajar dan mandiri dengan bantuan teknologi. Itulah yang kami sebut akses motivasi—dukungan psikologis dan sosial yang muncul karena adanya kesempatan pendidikan inklusi. Ke depan, kami ingin memperluas program ini supaya semakin banyak penyandang disabilitas yang terinspirasi untuk belajar." (Hind, Wawancara dengan Ibu HA, 22 Agustus 2025)

Program pelatihan literasi digital dari Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar penyandang disabilitas fisik. Melalui pendidikan digital yang inklusif, mereka tidak hanya memperoleh keterampilan teknologi, tetapi juga tumbuh rasa percaya diri dan semangat untuk mandiri, sehingga

pendidikan menjadi lebih setara dan berkualitas.

Kesimpulan dari ketiga narasumber tersebut adalah bahwa pendidikan, dukungan keluarga, dan program pelatihan literasi digital berperan saling melengkapi dalam meningkatkan motivasi belajar penyandang disabilitas fisik. Pengenalan teknologi meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri, dukungan keluarga memperkuat semangat belajar melalui bimbingan dan dukungan emosional, sedangkan program pemerintah melalui pelatihan digital menciptakan kesempatan yang lebih inklusif dan berkualitas. Dengan sinergi ketiga aspek ini, penyandang disabilitas fisik mampu mengatasi keterbatasan dan memiliki peluang yang lebih setara dalam pendidikan maupun kehidupan hidup.

2. Menilai Akses Material yang Tersedia

Akses material memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik. Dalam era digital, perangkat teknologi seperti laptop, smartphone, atau tablet menjadi sarana utama untuk mengakses pembelajaran daring. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan terjangkau juga menentukan sejauh mana peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal. Tanpa adanya perangkat dan jaringan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara akan sangat terbatas.

Bagi penyandang disabilitas fisik, akses material dalam pendidikan tidak hanya berupa perangkat teknologi, tetapi juga meliputi fasilitas pendukung

seperti software pembaca layar, aplikasi rumah disabilitas, dan ruang belajar yang inklusif. Infrastruktur sekolah maupun pusat belajar berbasis digital perlu ditancang dengan memperhatikan aksesibilitas, sehingga siswa dengan keterbatasan fisik tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan. Dengan demikian, akses material menjadi kunci utama agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setara melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut wawancara dari indikator akses material, Penyandang Disabilitas Fisik:

"Saya sebenarnya ingin sekolah luar kelas online, tapi kadang kesulitan karena saya punya handphone lama dan jaringan internet sering terputus. Kalau ada laptop atau perangkat yang lebih mendukung, pasti saya lebih mudah belajar dan mengikuti pelajaran digital." (Hasil Wawancara dengan DW, 22 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka di simpulkan Penyandang disabilitas tidak memiliki semangat tinggi untuk mengikuti pembelajaran digital, namun ketersediaan perangkat dan jaringan internet menjadi hambatan utama. Dukungan berupa laptop atau perangkat memadai sangat dibutuhkan agar mereka bisa mengoptimalkan proses belajar.

Selanjutnya wawancara dari orang tua murid:

"Kami berusaha mendukung anak kami dengan menyediakan kuota internet dan membelikan ponsel, meskipun sederhana. Tapi kami yang penting anak bisa belajar dan tetap terhubung dengan dunia luar. Namun, kalau ada bantuan perangkat yang lebih memadai dan pemerintah, tentu akan sangat membantu." (Hasil Wawancara dengan DW, 22 Agustus 2025).

Keluarga berperan penting dalam menyediakan dukungan material seperti kuota internet dan ponsel, meski dengan keterbatasan ekonomi. Bantuan tambahan dari

pemerintah dalam bentuk perangkat digital atau meningkatkan motivasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pendidikan maupun aktivitas sosial.

Berikut wawancara bersama Staf Dinas Sosial dalam indikator akses material.

"Kami menyadari bahwa akses material masih menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, melalui program inklusi sosial berbasis digital, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas pendidikan, muatan dan pelatihan berbasis teknologi hingga penyediaan perangkat yang ramah disabilitas. Tujuannya agar mereka tidak hanya memiliki motivasi, tetapi juga sarana nyata untuk mengakses teknologi." (Hasil Wawancara dengan Ibu NN, 22 Agustus 2025)

Dinas Sosial menyadari bahwa akses material menjadi kendala besar bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan program berbasis digital serta perangkat ramah disabilitas untuk memastikan mereka memiliki sarana nyata dalam memanfaatkan teknologi.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki motivasi tinggi untuk belajar melalui pembelajaran digital, tetapi ketersediaan perangkat dan jaringan internet menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga dalam bentuk penyediaan kuota internet dan ponsel semakin terurus, tetap berperan penting dalam menunjang proses belajar. Sementara ini, peran pemerintah melalui Dinas Sosial sangat dibutuhkan untuk menghadirkan solusi konkret, seperti penyediaan perangkat digital yang ramah disabilitas dan program berbasis teknologi. Dengan adanya sinergi antara semangat individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, penyandang disabilitas bisa dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara dan inklusif.

A. Menganalisis Akses Keterampilan

Akses keterampilan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan penyandang disabilitas fisik di era digital. Kemampuan untuk mengoperasikan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan aplikasi pembelajaran daring merupakan syarat utama mereka dapat mengikuti pembelajaran secara setara dengan siswa lain. Literasi digital dasar seperti mengetik, menggunakan aplikasi konferensi video, serta mengakses platform e-learning menjadi faktor utama bagi siswa penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan teknologi sebagai media belajar.

Namun, ketersediaan akses terhadap pelatihan khusus membuat banyak penyandang disabilitas belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Oleh karena itu, peran sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah sangat penting dalam menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang inklusif. Dengan adanya pelatihan yang menarik, penyandang disabilitas fisik tidak hanya mampu memahami materi pelajaran dengan lebih baik, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan pendidikan. Hal ini akan membuka peluang bagi terciptanya pendidikan yang setara, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut hasil wawancara terkait analisis akses keterampilan. Berikut hasil wawancara dengan **Penyandang Disabilitas Fisik (Siswa)** terkait indikator Akses keterampilan,

"Saya sebenarnya seorang ahli. Kalau ada pelajaran yang menggunakan teknologi, seperti belajar lewat video atau aplikasi online. Tapi kadang saya merasa kesulitan karena tidak terbiasa pakai cara menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya, waktu guru meminta kami mengkonversi tugas lewat Google Classroom, saya bingung bagaimana cara mengunggah file. Kalau ada pelatihan khusus atau guru yang membimbing lebih sabar, tentu

saya bisa lebih cepat belajar. Saya punya keinginan untuk bisa mahir menggunakan laptop, karena saya tahu itu akan membantu saya dalam belajar di sekolah, tapi juga nanti kalau sudah bekerja.” (Hasil Wawancara dengan FIR, 22 Agustus 2025)

Siswa penyandang disabilitas memiliki semangat tinggi untuk belajar menggunakan teknologi, namun keterbatasan keterampilan digital dan hambatan mereka sering kesulitan. Mereka membutuhkan bimbingan khusus dan pelatihan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pendidikan.

Dilanjutkan dengan wawancara orang tua murid,

“Kami melihat anak kami punya semangat belajar yang tinggi, tapi sering kali menghadapi keterampilan digital. Misalnya, saat sekolah meminta anak menggunakan aplikasi Zoom atau mengakses materi pembelajaran daring, itu sering bikin frustrasi kami.ajar saya, kami juga sudah terbiasa menggunakan teknologi, sehingga harus bisa membantu seperti itu. Kami tahu, karena itu, kami berharap sekolah atau pemerintah bisa menyediakan pelatihan keterampilan digital khusus untuk siswa disabilitas. Dengan begitu, anak-anak tidak harus sekuat ini, memiliki perangkat, tapi juga bisa menggongolannya dengan baik untuk mendukung pendidikan mereka.” (Hasil Wawancara dengan LN, 22 Agustus 2025)

Keluarga berperan dalam memberikan dukungan, namun keterbatasan pengetahuan teknologi membuat mereka tidak maksimal membantu. Dukungan dari sekolah dan pemerintah berupa pelatihan sangat dibutuhkan agar siswa disabilitas memiliki keterampilan digital yang memadai.

Staff Dinax Sosial Ibu NN,

“Kami menyadari bahwa keterampilan digital merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung pendidikan inklusi. Kami akan berupaya meningkatkan literasi digital. Tidak cukup hanya menyediakan perangkat atau akses internet, karena tanpa keterampilan, perangkat itu tidak akan maksimal digunakan. Oleh karena itu, kami

sedang berusaha merancang program literasi digital yang inklusif di mana siswa disabilitas bisa mendapatkan pelatihan keterampilan dasar hingga lanjutan sesuai kebutuhan mereka. Kami juga mendukung sekolah inklusi dan komunitas disabilitas untuk memastikan pelatihan ini tepat sasaran. Dengan keterampilan digital yang memadai, siswa penyandang disabilitas diharapkan mampu mengikuti pembelajaran daring secara mandiri, mengerjakan tugas dengan percaya diri, dan pada akhirnya bisa bersaing secara setara dengan siswa lainnya.” (Hasil Wawancara dengan NN, 21 Agustus 2023)

Pemerintah menyadari bahwa keterampilan digital adalah kunci keberhasilan pendidikan nasional. Program literasi digital inklusif sedang disiapkan agar penyandang disabilitas dapat belajar mandiri, percaya diri, dan bersaing setara dengan siswa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara awal di simpulkan bahwa siswa penyandang disabilitas memiliki motivasi tinggi untuk belajar dengan teknologi, tetapi hambatan keterampilan digital masih menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga penting namun terbatas karena kurangnya pengetahuan teknologi, sehingga diperlukan peran sekolah dan pemerintah dalam menyediakan bimbingan serta pelatihan. Melalui program literasi digital inklusif, penyandang disabilitas dapat meningkatkan keterampilan, belajar secara mandiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk bersaing secara setara dengan siswa lainnya.

4. Melalui akses penggunaan Digitalisasi Sosial

Melalui akses penggunaan digitalisasi sosial adalah proses untuk mengetahui sejauh mana individu atau kelompok, termasuk penyandang disabilitas, mampu memanfaatkan layanan, program, serta sarana digital yang disediakan pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini mencakup kemandirian

penggunaan teknologi, ketersediaan perangkat dan jaringan, keterampilan digital, serta dukungan lingkungan sekitar. Tuntannya adalah memastikan bahwa digitalisasi benar-benar dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua kalangan, sehingga tercapai keadilan sosial, partisipasi aktif, serta peningkatan kualitas hidup melalui teknologi yang inklusif. Berikut wawancara **Penyandang Disabilitas terkait Indikator Menuju akses penggunaan Digitalisasi Sosial**.

"Saya sangat senang bisa menggunakan handphone untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan semua. Tapi kadang saya kesulitan karena tidak semua aplikasi mudah diakses, dan jaringan internet sering putus. Kalau ada aplikasi yang lebih ramah untuk penyandang disabilitas, saya pun bisa lebih percaya diri dalam belajar." (Hani Wawancara dengan FZ, 22 Agustus 2025)

Penyandang disabilitas tidak memiliki semangat tinggi menggunakan teknologi, namun masih menghadapi kendala pada aksesibilitas aplikasi dan kualitas jaringan internet.

Dilanjutkan dengan pernyataan orang tua murid,

"Teknologi sangat bermanfaat, apalagi saat anak saya sulit ikut belajar tetap rumah. Dengan aplikasi belajar online, dia tetap bisa mengikuti pelajaran. Harusnya saja, kami sering terkendala biaya untuk kuota internet dan tidak semua keluarga mampu menyediakan laptop. Kami berharap ada bantuan perangkat dari pemerintah agar anak-anak disabilitas bisa belajar lebih maksimal." (Hani Wawancara dengan Ibu UN, 22 Agustus 2025)

Dukungan keluarga sangat penting, namun keterbatasan ekonomi dan fasilitas membuat peran mereka belum maksimal tanpa adanya bantuan tambahan dari pihak luar.

Selanjutnya wawancara dengan staff dinas sosial ibu NN,

"Kami menyadari bahwa digitalisasi sosial adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Saat ini, kami telah melaksanakan berbagai program literasi digital inklusif dan mulai menyediakan perangkat ramah disabilitas. Harapan kami, dengan dukungan ini, penyandang disabilitas bisa lebih mudah belajar, berkomunikasi, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari." (Hani, Wawancara dengan Tia Nani, 22 Agustus 2025).

Pemerintah berupaya meningkatkan akses digital melalui pelatihan dan penyediaan perangkat, meski masih perlu diperluas agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Kesimpulan dari hasil wawancara indikator Menilai akses penggunaan Digitalisasi Sosial adalah bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki motivasi tinggi dalam memanfaatkan teknologi, namun masih terdapat pada aksesibilitas aplikasi dan jaringan internet. Pihak keluarga turut mendukung, tetapi terhalang oleh kendala ekonomi dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui pelatihan dan penyediaan perangkat digital sangat diperlukan, disertai edukasi yang lebih luas agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat digitalisasi secara merata dan inklusif.

C. Pembahasan

1. Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Transformasi pendididkan di era digital membawa peluang baru bagi penyandang disabilitas fisik untuk mengembangkan potensi diri. Semangat belajar mereka didorong oleh motivasi yang diberikan dari dua hal, yaitu keinginan pribadi untuk mandiri dan berkembang, serta dukungan lingkungan sekitar. Di sisi personal, penyandang disabilitas menunjukkan sikap yang

kuat untuk menghadapi ilmu dan keterampilan manusia terbatas secara fisik. Sedangkan dari sisi eksternal, peran keluarga, tenaga pendidik, komunitas, dan pemerintah berfungsi sebagai penguat yang memambungkan rasa percaya diri sekaligus memberikan akses ryan pada teknologi.

Motivasi tersebut tampak dalam partisipasi aktif mereka untuk mempelajari keterampilan digital, kerap memanfaatkan aplikasi pendidikan daring, serta keyakinan bahwa teknologi mampu menjadi jembatan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi yang kuat, penyandang disabilitas tidak hanya sekadar ikut serta dalam pendidikan digital, tetapi juga menempatkan teknologi sebagai sarana penting menuju kesetaraan dan komunitas.

Wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak memperlihatkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang saling mendukung. Pertama, pendidikan berbasis teknologi memberi peluang baru sekaligus membangun rasa percaya diri. Kedua, keluarga memberikan dukungan moral dan material, walaupun masih terbatas oleh faktor ekonomi. Ketiga, pemerintah melalui program literasi digital inklusi berusaha menghapus akses dan menyediakan sarana yang lebih ramah disabilitas. Ketiga aspek ini membentuk sinergi yang mampu memperkuat motivasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan teknologi digital.

Dengan demikian, motivasi dapat dipandang sebagai inti dari proses inklusi pendidikan digital. Ketika motivasi internal diperkuat oleh dukungan eksternal, penyandang disabilitas fisik memiliki kesempatan yang lebih besar

untuk memperoleh pendidikan yang setara, meningkatkan kemandirian, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial.

2. Masalah Akses Material yang Tersedia

Keadilan akses pendidikan di era digital sangat bergantung pada tersedianya material pendukung yang memadai. Masyarakat bagi penyandang disabilitas fisik. Perangkat teknologi dan jaringan internet bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan menjadi instrumen utama agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran daring secara optimal. Tanpa dukungan material tersebut, kesenjangan pendidikan akan semakin nyata karena siswa dengan keterbatasan fisik sulit memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan siswa lainnya.

Selain itu, akses material bagi penyandang disabilitas fisik hanya mere, akses perangkat utama seperti laptop atau ponsel, melainkan juga sarana khusus yang mendukung keterbatasan mereka, seperti aplikasi ramah disabilitas, software pembaca layar, serta fasilitas belajar yang inklusif. Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan harus diiringi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus agar penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar.

Berdasarkan hasil analisis, mengenai penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran digital, keterbatasan perangkat dan jaringan rumah menjadi kendala utama. Pemas keluarga tetap penting melalui dukungan sederhana seperti penyediaan kartu internet atau paket, walaupun sering kali terbatas oleh kondisi ekonomi. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan solusi yang nyata, baik berupa

bantuan pemerintah untuk disabilitas maupun pelatihan literasi digital. Dengan adanya kolaborasi ini akan semangat individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, maka pendidikan digital yang setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat terwujud.

3. Menganalisis Akses Keterampilan

Peningkatan keterampilan digital merupakan salah satu langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di era pendidikan modern. Keterampilan mengoperasikan perangkat teknologi, baik komputer, smartphone, maupun aplikasi pembelajaran daring, menjadi prasyarat apakah mereka dapat mengikuti proses belajar secara setara dengan peserta didik lainnya. Penguasaan literasi digital dasar seperti penginstalan aplikasi konferensi video, mengedit, hingga menguasai platform e-learning memberikan peluang besar bagi penyandang disabilitas untuk lebih mudah memahami materi pelajaran sekaligus memperluas ruang belajar mereka.

Meski demikian, hambatan yang sering muncul adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan khusus yang relevan dengan kebutuhan mereka. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam menguasai keterampilan digital karena minimnya bimbingan teknis. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah menjadi sangat vital dalam menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui dukungan tersebut, penyandang disabilitas fisik dapat lebih percaya diri, aktif berpartisipasi, dan memiliki kesempatan yang lebih setara dalam pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara

penyandang disabilitas memiliki semangat tinggi untuk belajar menggunakan teknologi. Keterbatasan keterampilan digital dasar masih menjadi hambatan utama. Dukungan keluarga menjadi peran penting dalam mendampingi, namun sering kali terbatas oleh kurangnya pengetahuan teknologi. Karena itu, intervensi sekolah dan pemerintah dalam bentuk pelatihan literasi digital menjadi sangat dibutuhkan. Dengan adanya program literasi digital inklusif, penyandang disabilitas tidak hanya mampu menguasai teknologi, tetapi juga dapat belajar mandiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan bersaing secara sehat dengan siswa lain.

4. Memulai Akses Penggunaan Digitalisasi Sosial

Digitalisasi sosial pada dasarnya bertujuan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi setiap individu agar dapat berpartisipasi aktif dalam pendidikan maupun kehidupan sosial termasuk bagi penyandang disabilitas fisik. Memulai akses penggunaannya berarti melihat aspek teknologi yang disediakan—baik berupa perangkat, jaringan internet, maupun aplikasi pembelajaran—semana-bisa dapat digunakan secara mudah, adil, dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya menjadi inovasi, tetapi juga sarana nyata untuk mendorong kesetaraan kesempatan dalam mencapai pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi untuk belajar melalui teknologi, mereka masih mengalami kendala pada ketersediaan aplikasi yang ramah disabilitas dan kualitas jaringan internet. Keluarga tetap memberikan dukungan semampunya, namun kondisi ekonomi yang terbatas membuat peran mereka belum maksimal.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak meluluskan program pelatihan digital dan penyediaan petangkin yang lebih inklusif. Dengan langkah tersebut, manfaat digitalisasi sosial dapat dirasakan secara adil, merata, dan benar-benar mendukung terciptanya pendidikan yang setara bagi masyarakat disabilitas.



ORIGINALITY REPORT

10%	10%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
3	dinsos.makassarkota.go.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
6	pdfcoffee.com Internet Source	<1%
7	repository.umsb.ac.id Internet Source	<1%
8	www.scribd.com Internet Source	<1%
9	pt.scribd.com Internet Source	<1%
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1%
11	marisapurnama1blog.wordpress.com Internet Source	<1%

12	Suryanti S, Eka Ariaty Arfah. "Pengaruh Profesionalisme Akuntan Pendidik, Kecerdasan Emosional dan Metode Pembelajaran Terhadap Pemahaman Akuntansi", ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2019 Publication :	<1 %
13	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
16	detakriau.com Internet Source	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	trenggalekkab.go.id Internet Source	<1 %
20	www.harapanrakyat.com Internet Source	<1 %
21	www.manggarailkab.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes ☐

Exclude matches ☐

Exclude bibliography ☐

Ayuwarni Septania
105611121018 BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Aug-2025 12:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2736727004

File name: BAB_V_AYUWARNI_SEPTANIA.docx (16.86K)

Word count: 418

Character count: 3087

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari studi yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Strategi Pemerintah Melalui Digitalisasi Inklusi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Tingkat Akses Motivasi

Motivasi belajar penyandang disabilitas fisik tumbuh melalui sinergi pendidikan, dukungan keluarga, dan pelatihan literasi digital pemerintah. Teknologi memberi keterampilan dan rasa percaya diri, keluarga memberikan dukungan emosional, sedangkan pemerintah membuka akses inklusi. Kombinasi ketiganya memungkinkan penyandang disabilitas mengatasi keterbatasan, memperoleh pendidikan setara, dan meningkatkan kemandirian.

2. Menilai Akses Material yang Tersedia

Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran digital, namun masih terkendala perangkat dan jaringan internet. Dukungan keluarga tetap membantu meski terbatas, sedangkan pemerintah perlu hadir dengan solusi nyata melalui penyediaan fasilitas digital ramah disabilitas dan program pelatihan. Dengan kolaborasi antara motivasi individu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, tercipta

peluang pendidikan yang lebih inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas fisik.

3. Menganalisis Akses Material Yang Tersedia

Penyandang disabilitas fisik memiliki semangat tinggi dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar, namun keterbatasan keterampilan digital dasar menjadi kendala utama. Dukungan keluarga ada tetapi masih terbatas, sehingga diperlukan peran sekolah dan pemerintah dalam memberikan pelatihan literasi digital yang inklusif. Dengan adanya pelatihan tersebut, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan, belajar mandiri, serta memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara setara dalam pendidikan.

4. Menilai Akses Pengguna Digitalisasi Sosial

Penyandang disabilitas fisik memiliki motivasi kuat dalam memanfaatkan teknologi, tetapi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses aplikasi, perangkat, dan jaringan internet. Dukungan keluarga berperan, meski terbatas oleh kondisi ekonomi. Karena itu, intervensi pemerintah melalui penyediaan pelatihan dan perangkat digital yang lebih luas sangat diperlukan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata, inklusif, dan berkeadilan.

B. Saran

1. Bagi penyandang disabilitas fisik, diharapkan terus meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan digital agar dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan serta kemandirian hidup.
2. Bagi keluarga, perlu memberikan dukungan yang konsisten, baik berupa fasilitas, bimbingan, maupun dorongan emosional sehingga penyandang disabilitas merasa percaya diri dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bagi sekolah dan lembaga pendidikan, disarankan untuk menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dengan mengintegrasikan literasi digital serta memfasilitasi pelatihan yang menunjang kebutuhan khusus siswa disabilitas.
4. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan memperluas program digitalisasi inklusif, termasuk penyediaan perangkat rumah disabilitas dan jaringan internet yang memadai, agar tercipta pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi.
5. Untuk penelitian selanjutnya, studi ini masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang berpengaruh serta memperluas subjek penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

2

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

